



PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021-2026



KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala, bahwa penyusunan Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dapat terselesaikan sebagaimana mestinya

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2023 dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta adanya perubahan pohon kinerja dan cascading Dinas Perhubungan yang telah disusun berdasarkan logical frame work maka Renstra Dinas Perhubungan harus dilakukan penyesuaian.

Selanjutnya dengan adanya Penyesuaian Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan selama tahun 2021-2026, meskipun dalam prosesnya masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi bersama. Demikian Penyesuaian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 disusun. Tentunya terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan ini, untuk itu diharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikannya.

Paringin, 25 Juli 2023
Mengetahui,
Kepala Dinas Perhubungan
Kbupaten Balangan



Drs. H. MUSA ABDULLAH, M.AP
NIP. 19680113 199703 1 007

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud Dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	31
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	34
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	41
BAB III. ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	46
3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	47
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	50
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	62
3.4 Penentuan Isu Isu Strategis	66
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Visi dan Misi	69
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	70
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi	73
5.2 Kebijakan	74
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	76

BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN	BIDANG	URUSAN	82
	PERHUBUNGAN			
BAB VIII	PENUTUP			85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan mempunyai tugas pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan menyelenggarakan fungsi antara lain adalah Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan bidang perhubungan, Perumusan kebijakan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, Pembinaan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang perhubungan, Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan serta Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Berdasarkan Tupoksi di atas perlu disusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan 2021 – 2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan perhubungan yang terjadi di

Kabupaten Balangan. Rumusan permasalahan perhubungan diperoleh dari jaring aspirasi masyarakat dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor perhubungan, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan (2021-2026). Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan 2021 – 2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan 2021 – 2026 adalah jawaban konkrit terhadap terciptanya sistem perhubungan yang efisien dan berkualitas yang merupakan tuntutan masyarakat Kabupaten Balangan, dengan melakukan perbuatan nyata secara sistematis dan bertahap pada seluruh kegiatan program yang telah ditetapkan, yang dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan guna mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Balangan.

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Balangan perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.. Adapun data dan informasi yang harus disiapkan antara lain : Peraturan perundang-undangan yang terkait; kebijakan pemerintah yang terkait; dokumen-dokumen seperti RT/RW Kabupaten Balangan, Renstra Kementerian Perhubungan serta Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan, hasil evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan periode lalu.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Balangan, serta juga telah

menyesuaikan dengan rencana strategis Kementerian Perhubungan juga Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan

Pada Tahun 2023 dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta adanya perubahan pohon kinerja dan cascading Dinas Perhubungan yang telah disusun berdasarkan logical frame work maka Renstra Dinas Perhubungan harus dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini berkaitan dengan Penyesuaian Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Indikator Program, Kegiatan sesuai pohon kinerja dan cascading yang telah disusun berdasarkan logical frame work dan Sub kegiatan sesuai Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara , keberadaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Balangan.

1.2 Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Penyesuaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 antara lain adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
- 13) Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan PUG dan Focus Kepada Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024;

- 19) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 21) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Daerah kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.03 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah No.02 Tahun 2008;
- 23) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.
- 27) Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
- 28) Peraturan Bupati Balangan Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Penyesuaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 adalah :

1. Sebagai upaya perbaikan atas dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2016 yang merupakan penajaman Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
2. Penjabaran Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2021-2026 ke dalam program prioritas pembangunan daerah berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan periode lima tahun ke depan.
3. Penjabaran program prioritas Dinas Perhubungan yang dalam penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan.
4. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan.

Adapun tujuan penyusunannya adalah untuk integrasi, sinkronisasi, sinergitas, dan penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan Daerah terhadap dokumen pembangunan nasional, menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a) Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja/Tapkin Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKIP);
- c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun kedepan;
- d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

- e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.

1.4 **Sistematika Penulisan**

Penyesuaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

(Latar belakang penyusunan Renstra SKPD, pengertian Renstra SKPD dan proses penyusunan Renstra SKPD)

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

(Undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya)

1.3. Maksud dan Tujuan

(Menjelaskan maksud serta tujuan penyusunan Renstra PD, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD)

1.4. Sistematika Penulisan

(Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD ini)

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui renstra sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD dan mengulas hambatan-hambatan utama yang dihadapi.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

Memuat tentang dasar hukum pembentukan PD, Struktur organisasi serta uraian tugas pokok dan fungsi

2.2 Sumber Daya PD

Memuat penjelasan tentang sumber daya yang dimiliki PD

2.3 Kinerja Pelayanan PD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan target Renstra PD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan dan pelayanan PD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam periode 5 tahun.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi PD dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi PD dengan berpedoman pada strategi dan arah kebijakan RPJMD

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan Rencana program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu dengan berpedoman pada program, kegiatan, indikator kinerja pada RPJMD.
- b. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi PD serta disesuaikan dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- c. Program, Kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- d. Penentuan lokasi kegiatan dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang yang ditetapkan
- e. Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan SKPD dalam mengimplementasikan Renstra.

BAB VIII Penutup

- Lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat. Unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, sedangkan unsur pelaksana daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan adalah Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan bidang perhubungan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22.); Peraturan Bupati Balangan Nomor : 38 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Perhubungan; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan; Peraturan Bupati Balangan Nomor : 117 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan serta Peraturan Bupati Balangan Nomor : 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

a. Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi

1. Tugas pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor : 117 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan dimana disebutkan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan bidang perhubungan;
- b. Perumusan kebijakan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang perhubungan;
- g. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain-lain.

b. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan didukung dengan susunan organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 84 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Unsur-unsur organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengujian Sarana;
 - b. Seksi Lalu Lintas;
 - c. Seksi Angkutan;
4. Bidang Prasarana dan Keselamatan terdiri dari :
 - a. Seksi Keselamatan;
 - b. Seksi Prasarana;
 - c. Seksi Pengembangan.
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi yang dibebankan kepada unsur organisasi adalah sebagai berikut :

1) Tugas dan Fungsi Sekretariat

a. Tugas

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan

b. Fungsi :

1. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan
2. Pengoordinasian penyusunan dan pelaporan program kerja dan kegiatan di lingkungan SKPD.
3. Pengordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatausahaan
4. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan keuangan
5. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor
6. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan
7. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kepegawaian
8. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan internal kantor
9. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan; dan
10. Pelaksanaan tugas lain-lain.

2. Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang langsung berada di bawah Sekretaris dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas Pokok Melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan rencana program kerja dan kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan penyelenggaraan program kerja dan kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- e. Menyusun bahan tindak lanjut perencanaan dan informasi sebagai bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan SKPD;
- f. Melakukan sinkronisasi anggaran kegiatan di Bidang-Bidang dan melakukan kompilasi dokumen perencanaan SKPD;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA SKPD;
- h. Mengumpul dan mengolah data dan informasi sebagai bahan pelaporan keuangan dan kinerja;
- i. Menyusun bahan evaluasi monitoring, mengolah data dan informasi sebagai bahan pelaporan keuangan dan kinerja;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan LKIP SKPD;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian SPM/NSPK SKPD;

- l. Menyiapkan bahan penyusunan laporan Survey Kepuasan Masyarakat SKPD;
- m. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja SKPD lainnya sesuai amanah peraturan perundang-undangan;
- n. Menyusun bahan tindak lanjut perencanaan dan informasi sebagai bahan untuk penyusunan anggaran;
- o. Melakukan sinkronisasi anggaran kegiatan;
- p. Melakukan verifikasi administrasi keuangan;
- q. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan administrasi keuangan;
- r. Menerima kelengkapan administrasi tagihan/berkas untuk pelaksanaan proses pembendaharaan;
- s. Merencanakan pembuatan dan penyampaian SPJ;
- t. Mengoordinasikan administrasi tagihan/berkas untuk pelaksanaan proses pembayaran;
- u. Mengoordinasikan pembuatan dan penyampaian SPJ;
- v. Mengevaluasi administrasi tagihan untuk pelaksanaan proses pembayaran;
- w. Mengevaluasi pembuatan dan penyampaian SPJ;
- x. Menyusun bahan evaluasi monitoring, mengolah data dan informasi sebagai bahan pelaporan keuangan;
- y. Menyusun laporan realisasi semester dan prognosis;
- z. Melaksanakan urusan akuntansi keuangan SKPD;
- aa. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- bb. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- cc. Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan;
- dd. Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan;
- ee. Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- ff. Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi; dan
- gg. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

3. Tugas Sub Bagian Umum Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang langsung berada di bawah Sekretaris dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum memiliki tugas Melaksanakan urusan umum dan kepegawaian.

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut;

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan rencana program kerja dan kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan rencana program kerja dan kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. Melaksanakan administrasi surat menyurat, tata naskah dan kearsipan;
- f. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas;
- g. Menyusun data dan laporan kepegawaian;
- h. Memproses administrasi kepegawaian;
- i. Menghimpun dan memperbarui data dan informasi kepegawaian di lingkungan kantor sebagai bahan tindak lanjut proses kepegawaian;
- j. Mengkompilasi laporan e- kinerja dan e- absensi sebagai bahan pemberian TPP;
- k. Mengusulkan pengembangan kompetensi pegawai baik secara formal dan non formal, dalam bentuk sekolah, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, magang, dan sebagainya;

- l. Mengumpulkan, menyusun dan menilai rencana kebutuhan kantor sesuai standarisasi yang berlaku;
- m. Mengajukan usulan kebutuhan perlengkapan/rumah tangga kantor;
- n. Memelihara dan melakukan perbaikan inventaris perlengkapan/rumah tangga kantor;
- o. Melakukan pengawasan dan pengamanan aset di lingkungan kantor;
- p. Mengatur urusan kehumasan dan keprotokolan internal kantor;
- q. Memberikan pelayanan keprotokolan pada kegiatan rapat lingkup kantor;
- r. Memberikan pelayanan informasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan;
- s. Melakukan penyusunan standar pelayanan dan regulasi teknis ketatalaksanaan khusus internal kantor kewenangan utama SKPD;
- t. Melakukan koordinasi teknis dengan unit satuan kerja internal terkait penyusunan standar teknis ketatalaksanaan khusus internal kantor;
- u. Melakukan pengelolaan data dan sistem informasi manajemen perhubungan;
- v. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- w. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- x. Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan;
- y. Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan;
- z. Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- aa. Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi; dan
- bb. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

4. Tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang yang langsung berada di bawah dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan lalu lintas dan angkutan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- b. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan;
- c. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan keselamatan jalan;
- d. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan penyediaan angkutan umum, pelayanan angkutan, trayek, tarif dan operasi angkutan;
- e. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain-lain.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :

- (1). Seksi Lalu Lintas;
- (2). Seksi Angkutan;
- (3). Seksi Pengujian Sarana

1. Seksi Lalu Lintas

Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.

Kepala Seksi Lalu Lintas memiliki tugas pokok melaksanakan urusan penyediaan perlengkapan jalan dan manajemen rekayasa lalu lintas.

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas Kepala Seksi Lalu Lintas mempunyai Uraian tugas sebagai berikut;

- a. melakukan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
- b. melaksanakan pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. melaksanakan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten;
- e. melakukan koordinasi forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- g. melaksanakan pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten;
- h. melaksanakan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
- i. melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan;
- j. melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perlengkapan jalan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Seksi Angkutan

Seksi Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.

Kepala Seksi Angkutan memiliki tugas pokok melaksanakan urusan penyediaan angkutan umum, pelayanan angkutan, trayek, tarif dan operasi angkutan.

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Angkutan mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam Daerah;
- b. melaksanakan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam Daerah;
- c. melaksanakan perumusan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan;
- d. melaksanakan sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan;
- e. melakukan pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Daerah;
- f. melaksanakan penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Daerah;
- g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Daerah;
- h. melaksanakan perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan;
- i. melaksanakan sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan;
- j. melaksanakan perumusan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan;

- k. melaksanakan sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan;
- l. melaksanakan fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- m. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek;
- n. melaksanakan fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi dalam Daerah dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- o. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi dalam Daerah;
- p. melaksanakan analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam Daerah;
- q. melaksanakan penyediaan data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam Daerah;
- r. melaksanakan pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam dalam Daerah;
- s. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penyediaan angkutan umum, pelayanan angkutan, trayek, tarif dan operasi angkutan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Seksi Pengujian Sarana

Seksi Pengujian Sarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.

Kepala Seksi Pengujian Sarana memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pengujian Sarana mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut;

- a. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
- b. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor;
- c. melaksanakan registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor;
- d. melaksanakan penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor;
- e. melaksanakan sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor;
- f. melaksanakan identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji;
- g. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
- h. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- i. melaksanakan penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pengujian berkala kendaraan bermotor agar sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan; dan

- I. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Prasarana dan Keselamatan

Bidang Prasarana dan Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang langsung berada di bawah dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.

Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan prasarana, keselamatan serta pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas Pokok Kepala Prasarana dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pengelolaan terminal, perijinan dan fasilitas parkir;
- b. pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan keselamatan dan pengembangan transportasi; dan
- c. pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan keselamatan jalan

Bidang Prasarana dan Keselamatan terdiri dari :

- (1). Seksi Prasarana
- (2). Seksi Keselamatan
- (3). Seksi Pengembangan.

1. **Seksi Prasarana**

Seksi Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.

Kepala Seksi Prasarana memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pengelolaan terminal, perijinan dan fasilitas parkir.

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Prasarana mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut;

- a. melaksanakan penyusunan rencana pembangunan terminal penumpang;
- b. melakukan pembangunan gedung terminal;
- c. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana terminal;
- d. melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung);
- e. melaksanakan peningkatan kapasitas sdm pengelola terminal;
- f. melaksanakan fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pengelolaan terminal, perijinan dan fasilitas parkir agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya..

2. **Seksi Keselamatan**

Seksi Keselamatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.

Kepala Seksi Keselamatan memiliki tugas pokok Melaksanakan urusan pengelolaan terminal, perijinan dan fasilitas parkir.

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Keselamatan mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut;

- a. melakukan pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
- b. melakukan pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal;
- c. melakukan pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor;
- d. melakukan pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan keselamatan jalan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Seksi Pengembangan

Seksi Pengembangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang;

Kepala Seksi Pengembangan memiliki tugas pokok melaksanakan urusan penetapan rencana induk jaringan LLAJ dan andalalin.

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pengembangan mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten;
- b. melaksanakan penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ kabupaten;

- c. melaksanakan pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan rencana induk jaringan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- e. melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan rencana induk jaringan;
- f. mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan rencana induk jaringan;
- g. melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan rencana induk jaringan;
- h. melaksanakan penetapan kebijakan tata kelola andalalin;
- i. melaksanakan peningkatan kapasitas penilai andalalin;
- j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin;
- k. melaksanakan pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin;
- l. melaksanakan peningkatan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional (kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat) dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu (kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas) pada Dinas.

UPTD mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu serta pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPTD.

Tata Laksana Dinas Perhubungan

1. Prinsip Tata Laksana

Tata laksana Dinas Perhubungan mengacu pada delapan karakter dasar dalam mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik, yaitu :

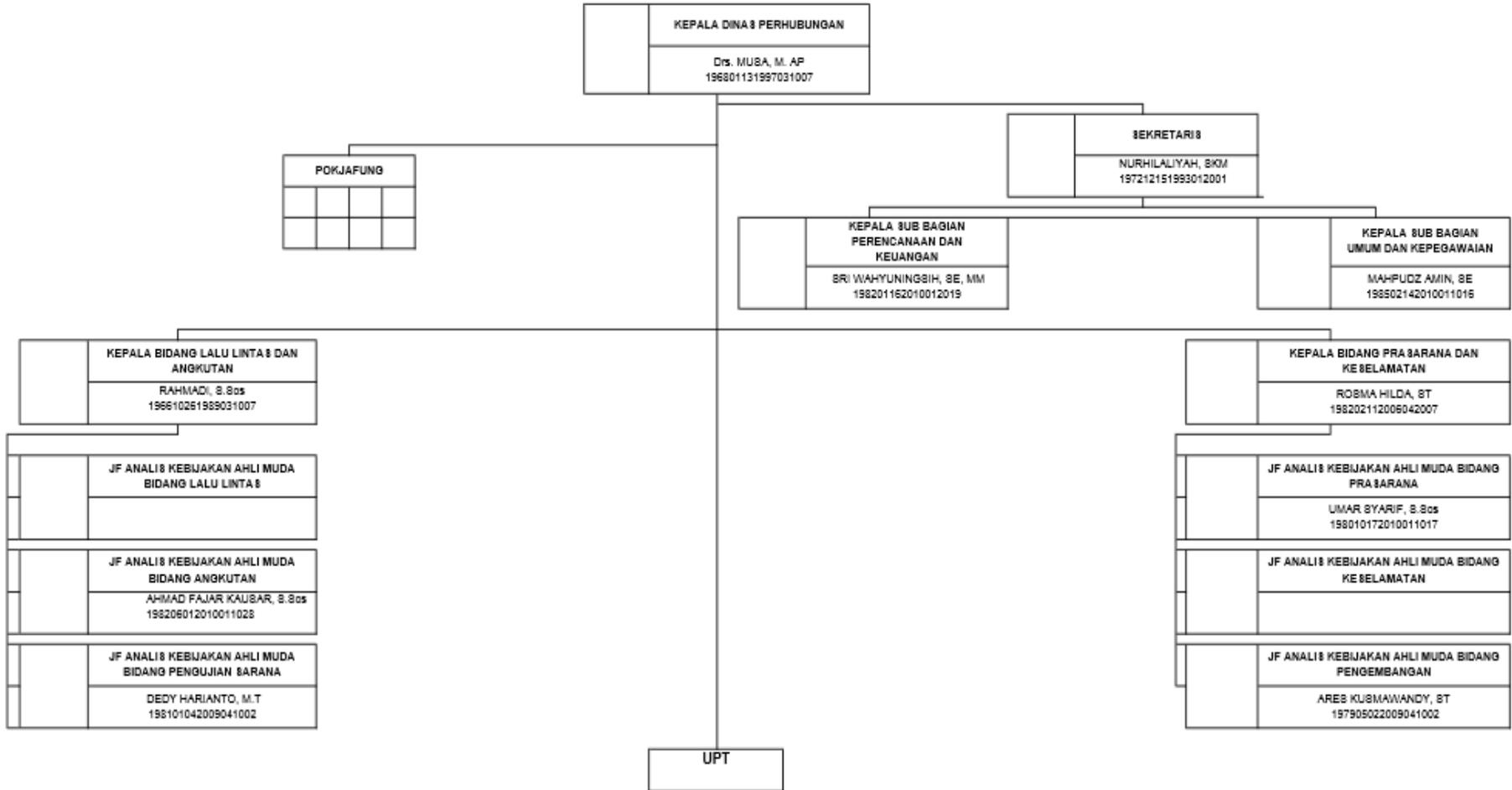
- a) Partisipasi Aktif dalam merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas dinas dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang perhubungan;
- b) Penegakan hukum, memberi sanksi bagi yang melanggar hukum;
- c) Transparansi, terbuka informasi bagi yang memerlukan kecuali yang sifatnyarahasia negara;
- d) Responsif dalam menjawab tuntutan untuk perbaikan;
- e) Berorientasi pada musyawarah untuk mufakat dalam merencanakan kegiatan,dan menyelesaikan permasalahan yang timbul;
- f) Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang dalam melayani;
- g) Efektif dan ekonomis dalam mengelola sumber daya;
- h) Akuntabilitas. Melaksanakan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada target target yang ditetapkan.

2. Tata Kerja

- a) Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup dinas maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua unsur di lingkungan pemerintah daerah;
- b) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku;
- c) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;

- d) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggungjawab kepada atasannya masing masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu waktu;
- e) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan atau arahan kepada bawahan;
- f) Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- g) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan Kepala Dinas dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BALANGAN



2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan pada tahun 2023 adalah sebanyak 146 orang yang terdiri dari tenaga kerja harian lepas/PTT sebanyak 116 orang dan Pegawai Negeri Sipil sebanyak 30 orang yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan dan jabatan eselonering sesuai dengan komposisi jabatan dan tanggung jawab masing masing pegawai yang dapat dikelompokkan menurut golongan dan jenjang pendidikan sebagai berikut :

SKPD	JLH (ORG)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JLH (ORG)	PANGKAT	JLH (ORG)	GOL.	JLH (ORG)
Dinas Perhubungan	30	SD	-	I/a	-	I	1
		SLTP	-	I/b	-	II	10
		SLTA	7	I/c	-	III	15
		D1	-	I/d	1	IV	4
		D2	3	II/a			
		D3	4	II/b	2		
		D4	1	II/c	3		
		S1	9	II/d	5		
		S2	6	III/a	6		
		S3	-	III/b	2		
				III/c	1		
				III/d	6		
				IV/a	3		
				IV/b			
				IV/c	1		
				IV/d	-		
				IV/e	-		
			30		30		30

Personil PNS Dinas Perhubungan yang berjumlah 30 orang dengan jenjang pendidikan dan jenjang kepangkatannya masing masing sebagaimana digambarkan sebelumnya adalah sumber daya yang memiliki nilai strategis bagi Institusi yang membidangi perhubungan di Kabupaten Balangan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa formasi jabatan struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan tidak semua terisi hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja.

Tenaga penguji kendaraan bermotor 5 orang dan yang telah mengikuti pendidikan Pengujian Kendaraan Bermotor sebanyak 5 orang, penguji kendaraan bermotor adalah jabatan fungsional teknis , pada dinas perhubungan jabatan fungsional ini belum ada yang ditetapkan dan idealnya Balai Pengujian Kendaraan Bermotor harus berupa Unit Pelayanan Teknis, hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja pengujian kendaraan bermotor.

Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang perhubungan sebanyak 2 orang, tugas dari PPNS bidang perhubungan salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap ketertiban lalu lintas angkutan jalan.

Sedangkan untuk tenaga kerja harian lepas sebanyak 116 (Seratus Enam Belas) orang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Surat Keputusan yang telah ditetapkan diantaranya:

1. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Type C : 2 orang
2. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaran dan
Pembangunan Fasilitas Parkir : 4 Orang
3. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota : 6 orang
4. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor : 4 orang

5. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas utk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	: 76 orang
6. Kegiatan Penyediaan Angkutan	: 9 orang
7. Sekretariat	: 15 orang

Jumlah	: 116 orang

Sedangkan sarana dan prasarana merupakan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan. Adapun sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan sebagai pendukung pelaksanaan tugas sebagai berikut :

1. Kendaraan

Sampai saat ini kendaraan bermotor dinas yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan adalah sebanyak 17 buah yang terdiri dari

Mobil Pengawalan dan Patroli	: 2 buah
Pick Up	: 1 buah
Station	: 2 buah
Sepeda Motor Dinas	: 12 buah

2. Komputer, Handycam, LCD dan Kamera

Komputer yang ada dan menjadi tanggungjawab Dinas perhubungan Kabupaten Balangan adalah 15 buah laptop. Disamping komputer Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan juga memiliki 1 buah handycam, 1 buah LCD dan 2 buah kamera digital.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas

2.3.1 Capaian Kinerja Yang Telah Dihasilkan Melalui Pelaksanaan Renstra 2016 – 2021

Terdapat lima indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi dinas yang dijadikan indikator pelayanan dinas sebagaimana disajikan dalam table TC 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan

Pendapatan Retribusi

Dinas Perhubungan mengelola pungutan 3 jenis retribusi daerah yaitu :

1. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
3. Retribusi Terminal – Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum

Pencapaian target retribusi daerah selama lima tahun (2016 s/d 2021) secara global mengalami kecenderungan kenaikan realisasi pendapatan pertahun. Secara rinci target realisasi pendapatan retribusi daerah disajikan pada Tabel 2.3. Namun ada target retribusi yang tidak tercapai.

Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target pendapatan yaitu :

1. Berkurangnya jumlah bis yang beroperasi yang masuk terminal dan berkurangnya angkutan umum yang beroperasi telah menyebabkan menurunnya retribusi terminal.

Pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang berkaitan dengan tingkat kinerja pelayanan terhadap masyarakat dengan memberikan jasa pelayanan di bidang Pendapatan Daerah, menuntut Pemerintah Daerah melakukan optimalisasi penggalian potensi pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor retribusi jasa umum, retribusi perijinan tertentu dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

a. Pelayanan Uji Kendaraan

Pengujian kendaraan bermotor atau disebut juga uji kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dilaksanakan oleh penguji yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sampai dengan tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan memiliki 5 orang penguji bersertifikasi. Terkait dengan pelayanan prima yang dilakukan pada proses pengujian, bahwa proses pengujian yang dilakukan jika dirata-ratakan memakan waktu sekitar 15 menit, dengan tarif uji disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan.

b. Rambu dan Alat Kelengkapan Jalan

Kebutuhan pemenuhan kelengkapan jalan terus mengalami peningkatan seiring dengan semakin pesatnya pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Balangan. Sampai dengan tahun 2021 pemenuhan alat kelengkapan jalan yang menjadi focus pengadaan dan pemeliharaan adalah alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) yang terdiri dari *warning light*, rambu pendahulu petunjuk jalan (RPPJ), marka jalan, *zebra cross*, zona selamat sekolah (ZOSS), alat pengendali dan pengaman pemakai jalan (*guardrail*), dan pita penggaduh. Pengadaan alat kelengkapan jalan secara rutin dilakukan dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keselamatan Transportasi dan dari dana APBD Kabupaten Balangan. Sedangkan pemeliharaan perlengkapan jalan dilakukan setiap tahun dengan sumber dana APBD Kabupaten Balangan.

c. Terminal dan Perparkiran

Kabupaten Balangan sampai dengan tahun 2021 memiliki satu buah terminal. Terminal yang ada di kabupaten Balangan adalah Terminal Paringin. Terminal ini merupakan Terminal Angkutan Pedesaan dan Terminal Antar Kota Dalam Propinsi sesuai status yang diberikan. Mulai tahun 2021 ini, Terminal ini secara bertahap akan dialihfungsikan dan direncanakan untuk membangun terminal baru. Hal ini dikarenakan terminal yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan Kota Paringin. Tahun 2022 nanti akan disusun Perencanaan untuk rencana pembangunan terminal baru Balangan.

Sementara berkaitan dengan pengelolaan parkir di Kabupaten Balangan, bahwa sampai dengan tahun 2021 terdapat 14 titik parkir di tepi jalan umum.

d. Layanan Angkutan Umum

Layanan angkutan umum hingga tahun 2020 belum dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan Tahun 2020 angkutan umum gratis yang rencananya akan dioperasionalkan dengan rute trayek Paringin - Juai - Halong tidak dapat terlaksana. Karena armada angkutan umum gratis untuk masyarakat digunakan sebagai sarana transportasi Tim Gugus Tugas penanganan Covid-19 sampai selesai.

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Balangan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikato	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan				55%	63%	72%	82%	91%	60%	74%	153%	156%	165%	109%	117%	212%	190%	181%
2	Persentase desa yang dilayani angkutan umum				15.8%	15.8%	28.48%	40.50%	50%	15.8%	15.8%	15.8%	15.8%	15.8%	100%	100%	55.47%	39%	31.6%
3	Titik Parkir yang dikelola				8 titik	9 titik	13 titik	14 titik	14 titik	8 titik	9 titik	13 titik	14 titik	14 titik	100%	100%	100%	100%	100%
4	PAD Retribusi Terminal				6 Juta	6 Juta	6 Juta	6 Juta	6 Juta	6 Juta	6 Juta	10 Juta	7,3 Juta	7,5 Juta	100%	100%	166%	121.6%	125%
5	Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan jalan pada jalan kabupaten				19.56%	35.53%	47.47%	73.07%	83.11%	19.56%	35.53%	42.03%	42.84%	42.84%	100%	100%	88.54%	58.63%	51.55%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa target rasio capaian kinerja 5 tahun terakhir ada yang terealisasi sesuai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan ada pula indikator yang tidak tercapai. adapun rasio capaian yang tidak mencapai target berturut-turut dari tahun 2018 sampai dengan 2020 yaitu indikator kinerja persentase desa yang dilayani angkutan umum dengan capaian kinerja berturut turut dari tahun 2018 samapai dengan 2020 sebesar 55,47%, 39%, 31,6%. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja ini adalah Berkenaan masih minimnya anggaran untuk Pengadaan angkutan umum untuk mencapai target kinerja dengan Indikator sasaran Persentase Desa yang Dilalui Angkutan Umum, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mengajukan proposal bantuan Pengadaan Umum kepada CSR. Dan pada Bulan November 2019 Dinas Perhubungan menerima satu unit mobil angkutan dari CSR. Namun meski sudah ada angkutan, kegiatan operasional tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pengadaan angkutan yang diperoleh melalui Hibah dari CSR terealisasi di Bulan November 2019 dan menerima STNK pada tanggal 16 Desember 2019 sehingga untuk kegiatan operasional angkutan yang rencananya untuk angkutan dengan rute Paringin - Juai - Halong tidak dapat terlaksana.

Sedangkan untuk Tahun 2020 target tidak tercapai dikarenakan adanya kebijakan armada angkutan umum gratis untuk masyarakat untuk digunakan sebagai sarana transportasi Tim Gugus Tugas penanganan Covid-19 sampai selesai.

Sedangkan untuk indikator kinerja Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan jalan pada jalan kabupaten juga tidak mencapai target yang telah ditetapkan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan capaian kinerja berturut turut sebesar 88,54%, 58,63%, 51,55%. Salah satu penyebab dari tidak tercapainya target adalah pada tahun 2019 Waktu yang tidak mencukupi untuk merealisasikan pekerjaan Pengadaan Marka Jalan karena terjadi penumpukan pekerjaan fisik lainnya yang harus diselesaikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sedangkan pada tahun 2020 tidak ada penambahan capaian kinerja karena kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator program dihapus dalam rangka Rasionalisasi dan efisiensi anggaran untuk penanganan Covid 19.

Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan kurun waktu 5 Tahun adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Balangan

Uraian *** (1)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada					Rasio antara Realisasi dan					Rata-rata	
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)	1 (12)	2 (13)	3 (14)	4 (15)	5 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	173.750.000	426.900.000	607.050.000	964.590.000	418.975.000	168.350.000	378.675.000	597.290.000	876.665.750	410.515.000	103	113	102	110	102	59%	58%
Persentase desa yang dilayani angkutan umum	7.179.000	22.825.000	20.102.000	49.027.000	13.770.000	-	22.312.500	13.317.000	32.916.876	-	-	102	151	149	-	46%	68%
Titik Parkir yang dikelola	60.250.000	81.600.000	193.950.000	185.500.000	307.390.000	60.000.000	77.950.000	191.816.640	181.475.000	224.040.000	100	105	101	102	137	35%	6%
PAD Retribusi Terminal	-	-	103.700.000	108.500.000	87.590.000	-	-	103.200.000	108.000.000	59.540.000	-	-	100	100	147	24%	5%
Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan jalan pada jalan kabupaten	487.472.306	479.427.300	1.301.910.000	867.100.000	4.578.132.000	483.532.000	474.517.000	1.272.186.500	730.735.731	4.432.628.167	101	101	102	119	103	2%	2%

Dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN tahun 2010-2014, pengarusutamaan gender (PUG) menjadi salah satu strategi pembangunan selain pembangunan berkelanjutan dan tata-kelola pemerintahan yang baik. Hal ini ditempuh untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan PUG yang diamanatkan dalam Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang belum berjalan seperti yang diharapkan. Dengan Inpres ini diinstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun daerah agar mengintegrasikan kondisi, aspirasi dan kebutuhan laki-lakidan perempuan dalam setiap tahapan manajemen instansinya. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan infrastuktur perhubungan yang responsif gender, Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan telah melakukan Penyusunan Data Terpilah Bidang Perhubungan Yang Responsif Gender.

Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan PUG adalah mata anggaran yang secara eksplisit menyebutkan kebutuhan perempuan dan laki-laki, yang ditunjukkan dengan program kegiatan yang dilaksanakan. Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan juga telah Menyusun focal point PUG. Keberadaan Focal Point PUG sebagai implementasi dari Permendagri No. 67 tahun 2011 merupakan komponen penting sebagai pionir dalam upaya mengedepankan pengarusutamaan gender (PUG) pada program dan perencanaan pembangunan di Dinas Perhubungan. Teknis penyusunan PPRG Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dilakukan melalui (1) analisis gender dengan Gender Analysis Pathway (GAP), (2) penyusunan Gender Budget Statement/Pernyataan Anggaran Gender (GBS/PAG) dan (3) mengintegrasikan hasil GAP, GBS dalam penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Berbagai kondisi *Internal* dan *Eksternal* yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan. Kondisi eksternal tersebut dapat merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan meliputi :

1. **Strengths (kekuatan) Internal**

- a. Tersedianya institusi kelembagaan daerah (SOTK)

Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dibentuk dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan

- b. Tersedianya Sumber Daya Manusia

Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan sampai dengan akhir tahun 2021, mempunyai jumlah pegawai sebanyak 99 orang yang dilatar belakangi berbagai disiplin ilmu dan sebagian besar Sarjana (S1).

- c. Terisinya seluruh jabatan Eselon III dan Esselon IV serta adanya TUPOKSI masing-masing bidang dan seksi sebagai acuan pelaksanaan tugas.
- d. Adanya dukungan APBD Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan kegiatan.
- e. Koordinasi antar instansi, Pemerintah Provinsi dan kabupaten / kota yang baik.

2. Weaknesses (kelemahan) Internal

a. Kualitas Sumber Daya Manusia belum merata (SDM Pegawai)

Kemampuan SDM dan keterampilan pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dimasing-masing bidang masih belum merata sebagaimana yang diharapkan, hal ini dikarenakan masih minimnya disiplin ilmu yang dimiliki sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan teknis.

b. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana transportasi darat.

3. Oportunities (peluang) Eksternal

a. pengembangan sistem angkutan umum masal yang memadai sebagai upaya untuk menarik kembali pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke kendaraan umum sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan capaian desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek.

b. Pengembangan dan peningkatan pada sarana dan prasarana perhubungan darat berupa terminal tipe C dikarenakan dengan dibangunnya jembatan kembar yang mengharuskan terminal yang ada dipindah/dibangun terminal baru.

c. Penataan kembali titik parkir sehingga dapat meningkatkan PAD dari retribusi parkir.

4. Threats (tantangan) External

a. Tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor

b. Rendahnya disiplin dan pengetahuan masyarakat dalam keselamatan transportasi

Proses identifikasi pada hasil analisa SWOT (tabulasi antara Faktor Eksternal: peluang dan ancaman dengan Faktor Internal: kekuatan dan kelemahan) diharapkan strategi yang dikembangkan akan menuju pada pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan. Hasil akhir identifikasi isu strategis yang disusun secara berurutan didasarkan pada urutan prioritas, agar memudahkan proses perumusan strategi.

Berikut ini merupakan Tabel analisis SWOT :

**Tabel
Analisa SWOT**

<i>INTERNAL</i>	KEKUATAN	KELEMAHAN
<i>EKSTERNAL</i>	1. Tersedianya institusi kelembagaan daerah (SOTK) 2. Tersedianya Sumber Daya Manusia 3. Terisnya seluruh jabatan Eselon III dan Esselon IV serta adanya TUPOKSI masing-masing bidang dan seksi sebagai acuan pelaksanaan tugas 4. Adanya dukungan APBD Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan kegiatan 5. Koordinasi antar instansi, Pemerintah Provinsi dan kabupaten / kota yang baik	1. Kualitas Sumber Daya Manusia belum merata (SDM Pegawai) 2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana transportasi darat
PELUANG	S - O	W - O
1. Pengembangan sistem angkutan umum masal yang memadai	1. Menghadirkan peran pemerintah dalam penyelenggaraan layanan jaringan dan distribusi transportasi	

<p>2. Pengembangan dan peningkatan pada sarana dan prasarana perhubungan darat berupa terminal tipe C</p> <p>3. Penataan kembali titik parkir sehingga dapat meningkatkan PAD dari retribusi parkir</p>	<p>melalui peningkatan kuantitas armada angkutan</p> <p>2. Mengembangkan sistem angkutan umum gratis</p>	
ANCAMAN	S - T	W -T
<p>1. Tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor</p> <p>2. Rendahnya disiplin dan pengetahuan masyarakat dalam keselamatan transportasi</p>	<p>1. Menghadirkan peran pemerintah dalam penyelenggaraan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kuantitas armada angkutan</p> <p>2. Mengembangkan sistem angkutan umum gratis</p>	<p>Peningkatan pemenuhan fasilitas keselamatan dan meminimalkan risiko kecelakaan yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, prasarana, dan/atau lingkungan dalam rangka Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan</p>

5. Strategi Strengths – Oportunities

- a. Menghadirkan peran pemerintah dalam penyelenggaraan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kuantitas armada angkutan
- b. Mengembangkan sistem angkutan umum gratis

6. Strategi Strengths – Threats

- a. Menghadirkan peran pemerintah dalam penyelenggaraan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kuantitas armada angkutan
- b. Mengembangkan sistem angkutan umum gratis

7. Strategi Weaknesses - Threats

- a. Peningkatan pemenuhan fasilitas keselamatan dan meminimalkan risiko kecelakaan yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, prasarana, dan/atau lingkungan dalam rangka Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Perhubungan pada Bab II, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tingginya angka kecelakaan lalu lintas jalan	Rendahnya pelayanan keselamatan jalan	Belum memadainya fasilitas keselamatan jalan
			Kurangnya Ketersediaan Sarana Prasarana pengujian kendaraan bermotor
2	Rendahnya Pelayanan Angkutan Orang Dalam Kabupaten	Ketiadaan moda transportasi angkutan orang dalam kabupaten	Meningkatnya angka penggunaan kendaraan pribadi dalam kabupten
			Belum tersedianya sistem dan simpul jaringan transportasi
		Belum berfungsinya terminal secara maksimal	Minimnya ketersediaan sarana prasarana terminal

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah :

Visi :

“ MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA “

Makna dari Visi tersebut sebagai berikut:

Visi di atas bermaksud bahwa Maju dan Sejahtera yang hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah "kabupaten yang lebih maju dan sejahtera", adalah sebuah profil Kabupaten Balangan yang memiliki masyarakat yang berkemajuan dari sisi pembangunan, Kehidupan masyarakat yang agamis, keadaan yang tertib dan aman, serta masyarakat yang sejahtera. Dalam arti yang lebih luas adalah Hasil pembangunan Kabupaten Balangan dapat dinikmati dan dirasakan oleh Masyarakat Balangan, berdayaguna dan berhasil guna, serta dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat untuk menuju Masyarakat sejahtera, agamis, aman, dan damai. Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kabupaten Balangan yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah

masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, Kabupaten Balangan secara umum akan lebih berkarakter untuk dapat menempatkan diri sebagai kabupaten yang tidak selalu berada di bawah, tetapi Kabupaten yang sejajar dengan Kabupaten tetangga, lebih maju dan sejahtera.

Misi :

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026, maka Dinas Perhubungan akan mendukung pelaksanaan misi dengan meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Balangan.

Untuk Misi Kepala Daerah “ meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan “, Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan memberikan kontribusi dengan meningkatkan pemenuhan sarana prasarana perhubungan darat yang meliputi : pemenuhan sarana prasarana terminal, sarana prasarana perparkiran serta pemenuhan prasarana keselamatan jalan.

Tabel. 3.2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi :				
“ <i>Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju Dan Sejahtera</i> “				
No	KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi : Meningkatkan dan Mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan			
	Program :			
1	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Belum terbangunnya terminal baru di Kabupaten Balangan yang memadai	Belum terbangunnya terminal baru di Kabupaten Balangan yang memadai	Mendorong dan memfasilitasi pembangunan terminal baru di Kabupaten Balangan yang memadai
		Masih kurangnya prasarana dan fasilitas perhubungan	Masih kurangnya prasarana dan fasilitas perhubungan	Meningkatkan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
		Belum maksimalnya sarana dan prasarana transportasi yang memenuhi standar keselamatan	Belum maksimalnya sarana dan prasarana transportasi yang memenuhi standar keselamatan	Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang memenuhi standar keselamatan
		Masih kurangnya peralatan uji kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar akreditasi Unit Pelayanan Kendaraan Bermotor	Masih kurangnya peralatan uji kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar akreditasi Unit Pelayanan Kendaraan Bermotor	Meningkatkan penyediaan alat pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar akreditasi Unit Pelayanan Kendaraan Bermotor

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Fungsi dan Kedudukan Renstra SKPD tahun 2021-2026 merupakan dokumen Strategis yang harus mengacu terhadap Perencanaan Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) dan merupakan penjabaran Visi dan Misi Program dan kegiatan serta memperhatikan RPJP daerah Kabupaten Balangan tahun 2005-2025, RPJM Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 serta memperhatikan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 - 2024 dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2026

Berdasarkan dokumen Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024, Permasalahan transportasi yang masih dihadapi saat ini sangat beragam sehingga perlu pendekatan secara menyeluruh dari berbagai aspek untuk menyelesaikannya. Kendati demikian, Kementerian Perhubungan selalu berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan transportasi yang ada, yaitu :

A. Aksesibilitas

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan keperintisan. Keperintisan merupakan jalur pembuka terisolasinya suatu daerah untuk menghubungkan daerah satu dengan yang lain atau dari daerah minus ke daerah maju maupun berkembang. Guna menjaga kesinambungan pelayanan keperintisan, maka perlu adanya pengaturan sarana dan cadangannya apabila terjadi kerusakan atau pelaksanaan pemeliharaan tahunan. Permasalahan penyelenggaraan angkutan perintis yang paling menonjol adalah waktu pelayanan karena keterbatasan sarana angkutan laut perintis dan keterbatasan penerbangan perintis.
- b. Masih kurangnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi. Masih rendahnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi dipengaruhi oleh faktor komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan atas risiko dan permasalahan lahan termasuk masalah perizinan yang berlaku di Indonesia.

c. Kondisi infrastruktur transportasi yang masih belum memadai

Terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Kementerian Perhubungan memiliki peran penting dalam upaya pembangunan IKN, diantaranya:

1. Mengembangkan transportasi multimoda dan konektivitas antarwilayah melalui :
 - meningkatkan konektivitas regional via darat, air, dan udara
 - mengupayakan keselamatan dan keamanan dalam bertransportasi
 - mengupayakan infrastruktur transportasi yang tahan bencana
 - merancang pelayanan transportasi terpadu dan berkualitas (*service level*)
2. Menyediakan aksesibilitas untuk mendukung aktivitas di IKN mengikuti master plan pembangunan IKN dengan pengintegrasian sistem transportasi perkotaan ke perumahan dan permukiman yang memadai, aman dan terjangkau (BRT,LRT,MRT,AGT)
3. Mengembangkan transportasi berbasis digital dengan pengintegrasian system transportasi dan sistem teknologi informasi dan komunikasi
4. Mengembangkan transportasi hijau dan ramah lingkungan melalui penggunaan transportasi umum berbasis ramah lingkungan dan mendukung penggunaan *charging station*

Berdasarkan pemetaan terhadap permasalahan rencana pelaksanaan agenda pembangunan sektor transportasi Kementerian Perhubungan pada tahun 2020 – 2024 untuk mempercepat pencapaian prioritas nasional yaitu :

- Dukungan terhadap Aksesibilitas Pariwisata
- Penguatan Rantai Logistik
- Dukungan Aksesibilitas pada Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); serta
- Pembangunan Sistem Transportasi di Ibu Kota Negara (IKN) Baru

Di dalam arahan Presiden, terkait dengan pelaksanaan 9 Misi, sektor perhubungan mempunyai fokus kegiatan yang harus ditangani untuk menunjang capaian misi, terutama pada misi 2, misi 3 dan misi 4 sebagai berikut :

Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

1. Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri
2. Mengembangkan infrastruktur perkotaan: perumahan/tempat tinggal/hunian, transportasi massal, sentra-sentra ekonomi yang terintegrasi, serta memastikan ketersediaan infrastruktur air bersih, tenaga listrik, dan pengolahan limbah/sampah
3. Meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana logistic domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital
4. Memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, termasuk transportasi *Online*, dengan menciptakan peluang bisnis, kepastian hukum pada pelaku usaha dan perlindungan pada konsumen, serta meningkatkan daya saing demi kepentingan nasional

Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

1. Pembenahan Infrastruktur (Tol Laut) terutama di Indonesia bagian Timur;
2. Meningkatkan konektivitas antarpulau, pelabuhan, dan tol laut
3. Membangun infrastruktur jalan tol, jalan kereta rei ganda, dan bandara di Sukabumi.

Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

1. Mengurangi emisi karbon dan meningkatkan transportasi massal ramah lingkungan

Kata kunci dalam Arahan Presiden untuk pelaksanaan pembangunan Sektor Perhubungan pada Tahun 2020 - 2024 adalah: penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan, transportasi perkotaan, penguatan rantai logistik, dukungan IPTEK dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Untuk Mendukung Visi Presiden Tahun 2020 – 2024 guna menjalankan agenda pembangunan dimaksud, ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan sebagai berikut :

“ Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Perhubungan memiliki misi antara lain :

1. meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi
2. meningkatnya kinerja layanan transportasi
3. meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi
4. tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan
5. terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Tujuan Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 adalah :

1. meningkatnya rasio konektivitas nasional menjadi 0,763 pada tahun 2024
2. meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan diindikasikan dengan
 - meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public sektor transportasi sebesar 88,5 pada tahun 2024
 - capaian *on time Performance* (OTP) layanan transportasi sebesar 82,08% pada tahun 2024
3. meningkatnya keselamatan transportasi yang diukur dengan rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan sebesar 23,71 pada tahun 2024

Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 antara lain :

1. Terwujudnya konektivitas Nasional
2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi
3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi

Tujuan RPJMN IV tahun 2020 - 2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (*goals*) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 Agenda Pembangunan. Berdasarkan ketujuh agenda tersebut, agenda yang memiliki keterkaitan erat dan utama dengan Kementerian Perhubungan adalah Agenda Kelima yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Sasaran utama pembangunan infrastruktur yang perlu dicapai Kementerian Perhubungan sebagai berikut :

- Konektivitas wilayah
- Infrastruktur ekonomi
- Infrastruktur perkotaan

Sasaran utama pembangunan infrastruktur Kementerian Perhubungan yang memiliki keterkaitan erat dan utama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dengan program prioritas infrastruktur ekonomi. Hal ini sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dengan indikator sasaran “ ***Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Perhubungan Darat*** “

Sasaran utama pemenuhan sarana prasarana perhubungan darat ini adalah pemenuhan sarana prasarana terminal, dimana di dalamnya berkaitan erat dengan pengembangan angkutan umum yang merupakan salah satu isu strategis Dinas Perhubungan, pemenuhan sarana prasarana perparkiran serta pemenuhan prasarana perlengkapan jalan.

Tabel 3.3.1

**Arah Kebijakan Rencana Strategis 2020-2024
Kementerian Perhubungan**

No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Menurunnya angka kecelakaan	Meningkatkan keselamatan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi • Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha • Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi • Penguatan kelembagaan
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan Prasarana transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kehandalan sarana dan prasaran transportasi serta penataan jaringan/rute • Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi • Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasaran transportasi
3.	Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan komponen sesuai dengan kebutuhan	Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan komponen sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun <i>Man Power Planning</i> SDM transportasi • Menyusun <i>Training Needs Analysis (TNA)</i> SDM transportasi. • Mengembangkan kapasitas diklat SDM transportasi. • Menata regulasi penyelenggaraan diklat SDM transportasi. • Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan. • Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi.
4.	Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan	Meningkatkan kualitas Penelitian transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya peneliti. • Peningkatan sinergitas antara Balitbang Perhubungan dengan pengguna jasa

			<p>penelitian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerjasama penelitian antar lembag riset dan industri. • Penyempurnaan regulasi dan kelembagaan untuk penguatan peran Badan Litbang Perhubungan.
5.	Meningkatnya kinerja capaian dalam Mewujudkan <i>good governance</i>	Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Penuntasan agenda reformasi birokrasi • pelaporan kinerja & keuangan. • Penyederhanaan perijinan dan penerapan e-government di lingkungan Kemenhub.
6.	Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan	Meningkatkan kuantitas & Kualitas penetapan & Implementasi regulasi sektor transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan arah/kebutuhan kerangka regulasi. • Peningkatan koordinasi dengan instansi lainnya. • Percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan. • Percepatan pelaksanaan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih.
7.	Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan Meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sector transportasi	Menerapkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim. • Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi terbarukan. • Penerapan sistem manajemen transportasi dalam rangka peningkatan penggunaan angkutan umum.
8.	Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan <i>Clean Governance</i>	Pelaksanaan pengawasan intern yang berintegritas, profesional dan amanah.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan peran Inspektur Jenderal sebagai konsultant dan <i>quality assurance</i>. • Peningkatan kualitas hasil pengawasan serta SDM pengawasan
9.	Meningkatnya kapasitas	Meningkatkan kapasitas,	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas

	sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda / multimoda	konektivitas / aksesibilitas antar wilayah & keterpaduan antarmoda / multimoda	<p>perencanaan pembangunan sarana dan prasarana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berdasarkan <i>outcomes</i>. • Pembangunan jaringan pelayanan yang terintegrasi antarmoda. • Mendorong pembangunan infrastruktur transportasi melalui swasta. • Penyiapan konsep & implementasi angkutan laut dari barat ke timur Indonesia.
10.	Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia (WTI)	Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil, & khususnya di WTI	<ul style="list-style-type: none"> • Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi guna memperkecil kesenjangan antar wilayah timur dan barat. • Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi. • Penyediaan sarana angkutan keperintisan di wilayah perbatasan, terluar, terpencil dan rawan bencana.
11.	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan	Mengembangkan sistem angkutan umum massal dengan orientasi kepada angkutan bus maupun rel dengan fasilitas alih moda terpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan konsep angkutan massal perkotaan yang lebih matang dan komprehensif. • Pengembangan BRT. • Pembangunan dan pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel. • Penyediaan dana subsidi / PSO yang terarah untuk penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan.
12.	Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema system manajemen transportasi perkotaan	Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dalam System manajemen perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan sistem informasi lalu lintas secara <i>real time</i>, penerapan ATCS dan <i>Virtual Mobility</i>. • Penerapan sistem tiket elektronik yang terintegrasi.

Tabel 3.3.2

**Arah Kebijakan Rencana Strategis 2021-2026
Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Selatan**

No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Terwujudnya konektivitas provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun sistem angkutan umum massal berbasis jalan melalui pembangunan halte bus di kawasan Banjarbakula • Penataan pelayanan angkutan umum di kawasan Banjarbakula. • Meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan melalui peremajaan, penambahan dan penataan trayek. • Melakukan kajian menyeluruh terhadap kualitas pelayanan transportasi di Kalimantan Selatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan system angkutan umum massal • Penataan pelayanan angkutan umum
2.	Meningkatkan keselamatan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian dan pihak lainnya guna menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, sosialisidan kampanye sadar dan tertib berlalu lintas. • Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas jalan pada ruas-ruas jalan provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian lalu lintas dan angkutan • Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait • Pengembangan system transportasi wilayah • Peningkatan keselamatan transportasi
3.	Meningkatkan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan yang memenuhi syarat keamanan pelayaran.	Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas keselamatan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan.	Pengembangan prasarana, sarana dan penunjang operasional angkutan perairan

4.	Terlaksananya peningkatan sistem prasarana pengendalian lalu lintas dan angkutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun sistem informasi manajemen fasilitas keselamatan jalan. • Menyusun rancangan Perda Andalalin guna menjalankan amanah regulasi bidang transportasi jalan. • Melaksanakan pemantauan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan. • Melaksanakan pemantauan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan. • Melakukan pemeliharaan terhadap alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan. • Membangun sarana dan prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan baik melalui dana daerah maupun diusulkan pada daa APBN. • Menyelenggarakan operasional terminal type B. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan kajian sebagai dasar pengembangan transportasi di Kalsel • Pengembangan sarana dan prasarana pendukung • Pembangunan sarana perpindahan moda transportasi yang berintegrasi, aman, nyaman dan terjangkau.
----	---	---	--

Dalam mewujudkan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan program prioritas untuk perhubungan darat diantaranya :

- Tersedianya angkutan massal berbasis jalan untuk mengembangkan suatu Kawasan
- Meningkatkan ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan
- Terlaksananya peningkatan sistem prasarana pengendalian lalu lintas dan angkutan

Program prioritas Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan yang erat kaitannya dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan adalah pencapaian sasaran kinerja program antara lain :

- Meningkatkan Aksesibilitas Transportasi antar Pedesaan
- Meningkatkan Prasarana perlengkapan Jalan
- Meningkatkan pelayanan jalan

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dapat terlihat pada table di bawah ini.

Tabel 3.3.3
Permasalahan Pelayanan
Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan
Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan dan Sasaran Renstra
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menurunnya angka kecelakaan	Kurang memadainya sarana, prasarana seta fasilitas keselamatan jalan	Kurangnya Pemeliharaan serta pemenuhan Sarana prasarana serta fasilitas keselamatan jalan	Tingginya permintaan masyarakat terhadap fasilitas keselamatan jalan
2	Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Belum optimalnya kinerja pelayanan transportasi	kinerja pelayanan transportasi	Terus meningkatkan kinerja pelayanan transportasi

3	Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan komponen sesuai dengan kebutuhan	Perlunya peningkatan kualitas SDM dalam bidang perhubungan baik dalam jumlah dan komponen sesuai kebutuhan	Kurangnya SDM dalam bidang perhubungan baik dalam jumlah dan komponen sesuai kebutuhan	Terus dikembangkan SDM bidang perhubungan
4	Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan	Perlunya penelitian Bidang perhubungan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan	Kurangnya penelitian bidang perhubungan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan	Terus dikembangkannya penelitian bidang perhubungan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan
5	Meningkatnya kinerja capaian dalam mewujudkan <i>good governance</i>	Perlunya mewujudkan <i>good governance</i> dalam bidang pelayanan perhubungan	Kurangnya kinerja dalam bidang pelayanan perhubungan	Terus ditingkatnya kinerja dalam bidang pelayanan perhubungan untuk mewujudkan <i>good governance</i>
6	Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan	Belum optimalnya penetapan regulasi dalam kebijakan masalah perhubungan baik berupa Perda ataupun Pergub	Belum optimalnya penetapan regulasi dalam kebijakan masalah perhubungan baik berupa Perda ataupun Pergub	Perlu dilakukan kajian secara terperinci untuk menetapkan regulasi dalam implementasi kebijakan perhubungan di daerah
7	Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya Penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi	Belum optimalnya penanganan dampak emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor transportasi di daerah	Belum optimalnya Penanganan dampak emisi gas rumah kaca (GRK) pada sector transportasi di daerah	Terus meningkatkan Dan mengoptimalkan penanganan dampak emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor transportasi di daerah
8	Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan <i>Clean</i>	Perlunya meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan	Kurang maksimalnya pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan bidang perhubungan	Terus ditingkatkannya pengawasan dalam pelaksanaan

	<i>Governance</i>	pelayanan bidang perhubungan		pelayanan untuk mewujudkan <i>Clean Governance</i>
10	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda / multimoda	Masih belum maksimalnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmod/multimoda	Masih belum Maksimalnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmod/multimoda	Terus meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmod/multimoda
11	Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema system manajemen transportasi perkotaan	Kurangnya pengembangan teknologi informasi dalam bidang transportasi	Kurangnya pengembangan teknologi informasi dalam bidang transportasi	Terus dikembangkan teknologi informasi dalam bidang transportasi

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan agar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Kabupaten Balangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200). Secara umum Kabupaten Balangan masih menghadapi tantangan yang cukup panjang dalam memenuhi capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini didasarkan atas capaian jumlah indikator yang sudah dan belum mencapai target nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026 berkorelasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahun 2021. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari misi Pembangunan KLHS yaitu “ Mewujudkan penyediaan dan pelayanan sektor Industri, Inovasi, dan Infrastruktur yang berkelanjutan ” dengan indikator kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu “ Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Perhubungan Darat ”

Hasil pengkajian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menunjukkan bahwa indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Balangan yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional sebanyak 84 indikator (38,18%), telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 42 indikator (19%), tidak ada data sebanyak 91 indikator (41,36%), dan indikator di luar wilayah kajian sebanyak 3 indikator (1,36%). Indikator TPB yang telah dilaksanakan dan belum memenuhi target nasional dan indikator TPB yang tidak ada data akan menjadi prioritas dalam penentuan skenario RPJMD Kabupten Balangan 2021 – 2026.

Alternatif proyeksi capaian indikator TPB dijadikan dasar dalam merumuskan Rekomendasi yang terdiri atas (1) Sasaran (2) Strategi dan arah kebijakan (3) Outcome/Program (4) Kegiatan dan (5) Instansi pelaksana. Alternatif dan Rekomendasi yang akan dintegrasikan kedalam RPJMD 2021 – 2026 terdiri atas (1) Indikator TPB yang terkait DDDTL sejumlah 11 indikator; dan (2) indikator yang tidak terkait DDDTL sejumlah 43 indikator.

Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan kondisi umum wilayah Kabupaten Balangan, kondisi umum 17 TPB dan kondisi 6 muatan lingkungan hidup. Selain itu juga mempertimbangkan isu pembangunan berkelanjutan prioritas. Isu Pembangunan Berkelanjutan Proritas yang merupakan hasil identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis dalam konsultasi publik oleh pemangku kepentingan yang perlu diselesaikan adalah 1) Kemiskinan; 2) Ketersediaan air bersih; 3) Pendidikan Berkualitas, 4) Penanggulangan Bencana; 5) Degradasi Sumberdaya alam dan lingkungan; 6) Persampahan, limbah, dan sanitasi yang layak; 7) Ketimpangan Infrastruktur pengembangan antar wilayah; dan 8) Kesehatan

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi:

1. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
2. Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi;
- c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan
- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

1. Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi, dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
2. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;
3. Pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terdiri atas pusat pelayanan kawasan (PPK), pusat pelayanan lingkungan (PPL), serta pusat kegiatan lain yang berhirarki lebih tinggi yang berada di wilayah kabupaten yang kewenangan penentuannya ada pada Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi;
 - b. Memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL); dan
 - c. Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang serta saling terkait menjadi satu kesatuan system wilayah kabupaten.
4. Dapat memuat pusat-pusat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL (dengan notasi PKLp);
 - b. Pusat kegiatan yang dapat ditetapkan menjadi PKLp hanya pusat pelayanan kawasan (PPK); dan

- c. Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya di dalam arahan pemanfaatan ruangnya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL.
5. Sistem jaringan prasarana kabupaten dibentuk oleh system jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dalam rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Balangan terdapat tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan. Adapun tujuan dan rencana struktur ruang tersebut adalah;

1. Mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Balangan;
2. Menyelaraskan antara perkembangan penduduk dan kebutuhan kelengkapan sarana dan prasarana pada setiap wilayah;
3. Mengoptimalkan keterbatasan ketersediaan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, alam, sumber daya binaan, dan sumber daya pembiayaan;
4. Pemecahan persoalan pengembangan wilayah;
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat.

Pertimbangan rencana struktur tata ruang yang ditetapkan adalah:

1. RTRWP Kalimantan Selatan;
2. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Balangan;
3. Perkembangan penduduk dan kelengkapan sarana dan prasarana pada tiap wilayah;
4. Keterbatasan Ketersediaan Sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, alam, sumber daya binaan, dan sumber dayapembiayaan;
5. Persoalan teknis Pengembangan Wilayah;
6. Hasil-hasil dialog;
7. Usaha pengembangan wilayah yang mungkin (perlu) dikembangkan;

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi RTRW sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4.1
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	RTRW Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembangunan Terminal penumpang Tipe C di Kabupaten Balangan	Belum terbangunnya terminal penumpang tipe C di Kabupaten Balangan	Belum terbangunnya terminal penumpang tipe C di Kabupaten Balangan	Terus dikembangkan Peningkatan simpul transportasi guna mendukung kelancaran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Masih kurangnya prasarana dan fasilitas perhubungan	Masih kurangnya prasarana dan fasilitas perhubungan	Meningkatkan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” atau kesenjangan harapan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Capaian kinerja pembangunan di berbagai bidang pada masa sebelumnya telah menghantarkan masyarakat Kabupaten Balangan ke dalam kondisi kehidupan yang semakin baik. Berbagai permasalahan pokok yang muncul pada awal periode pemerintahan sebelumnya telah seoptimalnya diatasi. Hal ini terbukti pada hasil capaian kinerja pembangunan pada akhir periode pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada berbagai bidang kehidupan

masyarakat. Namun demikian, patut diakui bahwa pembangunan yang sudah dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat pada periode pemerintahan yang lalu masih menyisakan beberapa permasalahan pokok yang mendasar guna mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Balangan yang lebih baik lagi.

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2016-2021, telah membuahkan hasil yang menggembirakan, tetapi tetap menyisakan tugas ke depan, yaitu mengatasi permasalahan-permasalahan pokok yang mendasar di masa datang. Beberapa permasalahan pembangunan mendasar yang dapat diidentifikasi dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Balangan, diantaranya adalah:

1. Masih belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi darat baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga berpengaruh terhadap investasi dan daya dukung untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Balangan.
2. Prasarana perhubungan untuk mendukung terwujudnya system tata kota sesuai hirarkhi rencana tata ruang masih belum optimal , antara lain belum terwujudnya fisik bangunan terminal angkutan
3. Penyediaan bahan kebijakan teknis berupa dokumen perencanaan umum bidang transportasi dan pemutahiran data data lalu lintas belum diwujudkan dengan optimal, antara lain penyusunan masterplan tranportasi (rencana induk jaringan lulintas jalan – RIJLLAJ dan Tatatan Rencana Transportasi Lokal – TATRALOK)

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, isu-isustrategis harus memenuhi kriteria memiliki pengaruh yang

besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah; merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Isu-isu strategis yang harus dikelola dengan baik dalam perjalanan masyarakat Balangan lima tahun mendatang, yaitu:

- 1) Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Perhubungan Darat
- 2) Peningkatan akses angkutan orang dalam kabupaten

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab IV dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan,

4.1 Visi dan Misi Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026

4.1.1 Visi Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026

Guna memadukan, mengarahkan menggerakkan serta memberikan kekuatan, semangat dan komitmen dalam menjalankan roda organisasi maka perlu ditetapkan suatu Visi. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang.

Adapun Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 Mengacu pada Visi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2021–2026, yaitu:

..”Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju Dan Sejahtera”

Visi di atas bermaksud bahwa Maju dan Sejahtera yang hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT..

4.1.2 Misi Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Dengan melihat dan memperhatikan permasalahan umum dan Tugas Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan serta Aspirasi dan masukan yang diterima, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan selama Lima Tahun ke depan (Tahun 2021-2026) mengacu pada Misi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2021–2026, yaitu pada Misi I :

“Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan”

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan

Dari visi dan misi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan. . Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah tersebut sebagaimana berikut :

4.2.1 Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan

Tujuan merupakan implementasi/penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai dan menghasilkan apa, dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026 adalah

“Terwujudnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berkualitas”

Untuk mengukur keberhasilan tujuan di atas ditetapkan indikator tujuan yaitu :
“Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi”

Tujuan	Indikator Tujuan	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	82,98	84,18	85,39	86,59	87,80	89,00

4.2.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026 adalah :

- 1) Meningkatnya kinerja layanan moda transportasi
- 2) Meningkatnya keselamatan transportasi

Adapun tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	6 (2026)
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berkualitas	Meningkatnya kinerja layanan moda transportasi	Persentase Load Factor (kapasitas muatan)	122,4%	137%	137%	108,1%	105,9%	100%
		Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0027

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan

Pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai disebut dengan strategi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut:

Strategi

A. Strategi Peningkatan Penyelenggaraan Perhubungan

Strategi ini diarahkan untuk penataan penyelenggaraan perhubungan dan penataan sistem transportasi lokal kabupaten sejalan dengan dinamika perubahan lingkungan strategis melalui :

1. Meningkatkan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, sarana prasarana transportasi darat secara optimal
2. Menyelenggarakan layanan transportasi melalui penyediaan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien

5.2 Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Balangan 2021-2026, kebijakan umum yang ditempuh sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemenuhan fasilitas kesematan jalan serta melaksanakan pemeliharaan fasilitas kesematan jalan
2. Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana terminal dan perparkiran
3. Meningkatkan akses layanan transportasi darat
4. Meningkatkan sistem dan simpul jaringan transportasi
5. Meningkatkan pelayanan kendaraan wajib uji pengujian kendaraan bermotor
6. Meningkatkan pelayanan terminal dan perparkiran
7. Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang perhubungan
8. Meningkatkan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas
9. Meningkatkan intensitas penegakan hukum terhadap operasional angkutan
10. Meningkatkan keselamatan dari faktor sarana dengan peningkatan jumlah kendaraan wajib uji pengujian kendaraan bermotor
11. Meningkatkan fungsi alat pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan standar
12. Meningkatkan intensitas sosialisasi ketertiban lalu lintas kepada masyarakat

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah Dinas Perhubungan, disajikan pada tabel berikut :

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

VISI : MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA			
MISI I : Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berkualitas	Meningkatnya keselamatan transportasi	Meningkatkan pemenuhan fasilitas keselamatan secara optimal dan meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemenuhan fasilitas kesematan jalan serta melaksanakan pemeliharaan fasilitas kesematan jalan 2. Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana terminal dan perparkiran 3. Meningkatkan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas 4. Meningkatkan intensitas penegakan hukum terhadap operasional angkutan 5. Meningkatkan keselamatan dari faktor sarana dengan peningkatan jumlah kendaraan wajib uji pengujian kendaraan bermotor 6. Meningkatkan fungsi alat pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan standar 7. Meningkatkan intensitas sosialisasi ketertiban lalu lintas kepada masyarakat
	Meningkatnya kinerja layanan moda transportasi	Menyelenggarakan layanan transportasi melalui penyediaan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses layanan transportasi darat 2. Meningkatkan sistem dan simpul jaringan transportasi 3. Meningkatkan pelayanan kendaraan wajib uji pengujian kendaraan bermotor 4. Meningkatkan pelayanan terminal dan perparkiran 5. Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang perhubungan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai penjabaran dari kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka ditetapkanlah rencana Program dan Kegiatan beserta indikator keberhasilannya. Pembentukan program dan kegiatan didasarkan analisa kebutuhan dan dinamisasi pembangunan bidang perhubungan dengan mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah, serta tujuan sasaran dan strategi. Berikut ini rincian program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pengadaan Mebel
 - d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - f. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - h. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota
 - b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - c. Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/kota
Sub Kegiatan :
 - a. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

- b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
 - d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
3. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- Sub Kegiatan :
- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
 - b. Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
 - c. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
 - d. Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C
 - e. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
4. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- Sub Kegiatan :
- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - c. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor

- d. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - e. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - f. Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
 - g. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - h. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - i. Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - j. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
6. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- a. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - b. Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
 - c. Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
 - d. Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - e. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - f. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - g. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
7. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin

- b. Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin
 - c. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
 - d. Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin
8. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
- Sub Kegiatan :
- a. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
 - b. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
 - c. Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C
 - d. Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - e. Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
9. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
10. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN

Indikator Kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tujuan RPJMD : Meningkatnya Infrastruktur Wilayah Perdesaan dan Perkotaan

Sasaran RPJMD : Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur publik

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase jalan yang tertib manajemen lalu lintas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase wilayah (desa/kecamatan) yang terlayani moda transportasi	36,8%	36,8%	66,7%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase moda transportasi yang laik jalan	78%	82%	86%	91%	95%	100%	100%
4	Jumlah pelanggaran moda transportasi	15 Pelanggaran	14 Pelanggaran	13 Pelanggaran	12 Pelanggaran	11 Pelanggaran	10 Pelanggaran	10 Pelanggaran

**PROGRAM KEGIATAN RENSTRA
PENDUKUNG STRATEGI DAN KEBIJAKAN RPJMD
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BALANGAN**

Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD	Kebijakan RPJMD	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur publik	Meningkatkan konektivitas wilayah dan antar wilayah	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana transportasi darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase moda transportasi yang laik jalan	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase moda transportasi yang lulus uji
				Persentase jalan yang tertib manajemen lalu lintas	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/kota	Persentase jalan yang berkeselamatan
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase kawasan parkir yang tertib/tertata
					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/Kota	Persentase jaringan jalan yang tertib manajemen rekayasa Lalu Lintas
				Persentase wilayah (desa/kecamatan) yang terlayani moda transportasi	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang berfungsi sesuai standar
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia

PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS
PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BALANGAN

Sasaran	Indikator	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase moda transportasi yang laik jalan	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase moda transportasi yang lulus uji
			Persentase jalan yang tertib manajemen lalu lintas	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/kota	Persentase jalan yang berkeselamatan
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase kawasan parkir yang tertib/tertata
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/Kota	Persentase jaringan jalan yang tertib manajemen rekayasa Lalu Lintas
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi andalalin yang tertindaklanjuti
Jumlah Pelanggaran Moda Transportasi	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase moda transportasi yang memiliki syarat lengkap Persentase pengemudi moda transportasi yang memiliki kelengkapan syarat			
Meningkatnya kinerja layanan moda transportasi	Persentase Load Factor (kapasitas muatan)		Persentase wilayah (desa/kecamatan) yang terlayani moda transportasi	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan trayek yang dilalui moda transportasi
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang berfungsi sesuai standar

BAB VIII

PENUTUP

Penyesuaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan merupakan pedoman bagi Bidang dan sekretariat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahun, serta merupakan dokumen yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan urusan bidang perhubungan dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Selanjutnya Penyesuaian RENSTRA tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan akan melaksanakan penyusunan Renja Tahun 2021-2026 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas, dan untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional, provinsi dan Kabupaten.

Penyesuaian Perencanaan Strategis (Renstra) yang salah satunya didasarkan pada pohon kinerja yang disusun berdasarkan logical framework dapat menggambarkan hubungan kausalitas dalam penetapan kinerja, semua indikator kinerja yang ditetapkan memenuhi prinsip logical framework dalam menjabarkan kinerja dan ukurannya secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah sehingga ukuran kinerja setiap level jabatan dan ukuran kinerja dari penggunaan anggaran menjadi lebih relevan dengan kinerja utama SKPD, sehingga pemerintahan yang berorientasi hasil dapat direalisasikan secara nyata.

Paringin, 25 Juli 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Balangan



Drs. H. MUSA ABDULLAH, M.AP
NIP. 19680113 199703 1 007

**Tabel T-C.27. (Sebelum Penyesuaian RENSTRA)
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan
Kabupaten Balangan**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Ket				
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(20)				
Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian serta Pelayanan Administrasi Keuangan	2	15	01	2	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	68,10 100%	68,15 100%	4.082.982,818 100%	68,20 100%	4.060.654,770 100%	68,50 100%	6.218.741,000 100%	69 100%	6.950.184,000 100%	69,50 100%	7.474.689,000 100%	70 100%	7.769.000,000 100%	70 100%	32.473.268,770 100%	Sekretariat	Sekretariat			
		2	15	01	2	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100%	100%	93.480,000	100%	89.880,000	100%	160.715,000	100%	177.500,000	100%	194.900,000	100%	213.600,000	100%	930.075,000	Sekretariat	Sekretariat			
		2	15	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	3 Dok	3 Dok	87.180,000	2 Dok	87.180,000	2 Dok	144.615,000	2 Dok	160,000,000	2 Dok	176,000,000	2 Dok	193,600,000	13 Dok	848.575,000	Sekretariat	Sekretariat		
		2	15	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Perhubungan	2 Dok	4 Dok	2.700,000	-	-	2 Dok	4,000,000	2 Dok	4,500,000	2 Dok	4,950,000	2 Dok	5,500,000	12 Dok	21.650,000	Sekretariat	Sekretariat		
		2	15	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Dinas Perhubungan	2 Dok	-	-	-	2 Dok	4,000,000	2 Dok	4,500,000	2 Dok	4,950,000	2 Dok	5,500,000	12 Dok	18.950,000	Sekretariat	Sekretariat			
		2	15	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok	2 Dok	3,600,000	2 Dok	2,700,000	2 Dok	4,600,000	2 Dok	5,000,000	2 Dok	5,000,000	2 Dok	5,000,000	12 Dok	25.900,000	Sekretariat	Sekretariat		
		2	15	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	1 Dok	-	-	-	1 Dok	3,500,000	1 Dok	3,500,000	1 Dok	4,000,000	1 Dok	4,000,000	6 Dok	15,000,000	Sekretariat	Sekretariat			
		2	15	01	2	02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	3.082.254,800	100%	3.124.365,370	100%	3.785.500,000	100%	4.164.200,000	100%	4.580.220,000	100%	5.038.850,000	100%	5.038.850,000	100%	23.775.390,170	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	100%	2.992.662,800	100%	3.067.479,370	100%	3.650,000,000	100%	4.015,000,000	100%	4.416,500,000	100%	4.858,150,000	100%	22.999,792,170	Sekretariat	Sekretariat		
		2	15	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentasi dokumen keuangan yang diverifikasi	100%	100%	89.592,000	100%	56.886,000	100%	132,000,000	100%	145,200,000	100%	159,720,000	100%	175,700,000	100%	759,098,000	Sekretariat	Sekretariat		
		2	15	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentasi Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	-	-	-	100%	3,500,000	100%	4,000,000	100%	4,000,000	100%	5,000,000	100%	16,500,000	Sekretariat	Sekretariat			
		2	15	01	2	05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	102.529,000	100%	138.846,000	100%	384.550,000	100%	391.705,000	100%	395.365,000	100%	399.710,000	100%	399.710,000	100%	1.812.705,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	110 Stel	66,550,000	115 Stel	73,205,000	120 Stel	76,865,000	120 Stel	80,710,000	685 Stel	297,330,000	685 Stel	297,330,000	Sekretariat	Sekretariat		
		2	15	01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	12 Laporan	3,000,000	12 Laporan	3,500,000	12 Laporan	3,500,000	12 Laporan	4,000,000	12 Laporan	4,000,000	60 Laporan	14,000,000	Sekretariat	Sekretariat		
		2	15	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang	4 Orang	20,326,000	-	-	2 Orang	30,000,000	2 Orang	30,000,000	2 Orang	30,000,000	2 Orang	30,000,000	11 Orang	140,326,000	Sekretariat	Sekretariat		
		2	15	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	0,000	5 Orang	35,000,000	5 Orang	35,000,000	5 Orang	35,000,000	5 Orang	35,000,000	5 Orang	35,000,000	25 Orang	140,000,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	15 Orang	82,203,000	23 Orang	138,846,000	25 Orang	250,000,000	25 Orang	250,000,000	25 Orang	250,000,000	25 Orang	250,000,000	125 Orang	1,221,049,000	Sekretariat	Sekretariat		
		2	15	01	2	06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	317.140,800	100%	313.654,500	100%	749.100,000	100%	791.700,000	100%	825.600,000	100%	883.570,000	100%	883.570,000	100%	3.880.765,300	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	-	93 Buah	4,645,100	300 Buah	20,000,000	300 Buah	20,000,000	300 Buah	20,000,000	300 Buah	20,000,000	1.750 Buah	84,645,100	Sekretariat	Sekretariat		
		2	15	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26 Buah	26 Buah	7,400,000	32 Buah	34,000,000	100 Buah	100,000,000	100 Buah	100,000,000	100 Buah	100,000,000	100 Buah	100,000,000	576 Buah	441,400,000	Sekretariat	Sekretariat		
		2	15	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-	5 Buah	15,000,000	10 Buah	30,000,000	10 Buah	30,000,000	10 Buah	30,000,000	10 Buah	30,000,000	40 Buah	105,000,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan pengandaian	80.239 Lembar	80.239 Lembar	24,071,800	69.141 Lembar	20,742,400	175.000 Lembar	50,000,000	175.000 Lembar	50,000,000	185.000 Lembar	55,000,000	185.000 Lembar	55,000,000	1.052.650 Lembar	254,814,200	Sekretariat	Sekretariat		
		2	15	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	96 Eksm/Bulan	96 Eksm/Bulan	9,600,000	112 Eksm/Bulan	4,800,000	120 Eksm/Bulan	12,000,000	120 Eksm/Bulan	12,000,000	120 Eksm/Bulan	12,000,000	120 Eksm/Bulan	12,000,000	720 Ekm	62,400,000	Sekretariat	Sekretariat		

		2	15	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan Jumlah makan dan minum yang disediakan untuk mendukung kegiatan rapat	144 Kali 2240 Porsi	144 Kali 2240 Porsi	276,069,000	127 Kali 645 Porsi	249,467,000	125 Kali 2000 Porsi	552,100,000	125 Kali 2000 Porsi	579,700,000	125 Kali 2000 Porsi	608,600,000	150 Kali 2000 Porsi	666,570,000	758 Kali 10000 Porsi	2,932,506,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	07	04	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	100%	175,000,000	100%	395,000,000	100%	375,000,000	100%	25,000,000	100%	970,000,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	2 Unit	80,000,000	3 Unit	120,000,000	1 unit	350,000,000	-	-	6 Unit	550,000,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	2 Unit	80,000,000	1 Unit	250,000,000	-	-	-	-	3 Unit	330,000,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	3 Buah	15,000,000	5 Buah	25,000,000	5 Buah	25,000,000	5 Buah	25,000,000	23 Buah	90,000,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	08	04	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	174,451,050	12 Bulan	150,991,900	12 Bulan	287,800,000	12 Bulan	302,175,000	12 Bulan	323,055,000	12 Bulan	348,600,000	60 Bulan	1,587,072,950	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola	900 Surat	900 Surat	5,550,000	900 Surat	5,550,000	900 Surat	47,300,000	900 Surat	55,900,000	900 Surat	69,230,000	900 Surat	88,150,000	4,500 Surat	271,680,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	75,624,000	100%	73,400,000	100%	125,000,000	100%	125,000,000	100%	127,000,000	100%	130,000,000	100%	656,024,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	93,277,050	12 Bulan	72,041,900	12 Bulan	115,500,000	12 Bulan	121,275,000	12 Bulan	126,825,000	12 Bulan	130,450,000	60 Bulan	659,368,950	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	09	04	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	313,127,168	12 Bulan	242,917,000	12 Bulan	676,076,000	12 Bulan	727,904,000	12 Bulan	780,549,000	12 Bulan	859,670,000	60 Bulan	3,600,243,168	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas Layak Fungsi	-	-	-	-	-	100%	262,500,000	100%	287,500,000	100%	325,625,000	180 Unit/Tahun	369,500,000	180 Unit/Tahun	1,245,125,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100%	100%	265,607,168	100%	195,397,000	100%	276,576,000	100%	290,404,000	100%	304,924,000	100%	320,170,000	100%	1,653,078,168	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-	-	-	-	-	5 Buah	25,000,000	25 Buah	100,000,000	Sekretariat	Sekretariat							
		2	15	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung kantor layak fungsi	100%	100%	47,520,000	100%	47,520,000	100%	87,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	120,000,000	100%	502,040,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung layak fungsi	-	-	-	-	-	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	100,000,000	Sekretariat	Sekretariat	
Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2	15	02	2	01	01	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	78%	78%	7,105,559,500	82%	6,888,774,600	86%	8,301,213,000	91%	8,556,544,000	95%	8,163,888,000	100%	9,711,225,500	100%	48,727,204,600	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Kab. Balangan	IKK Urusan Perhubungan
									Persentase Prasarana Perengkapan Jalan	19.48%	23.42%		39.48%		57.95%		85.97%		91.18%		100%		100%		PMDN 86 Tahun 2017		
									Persentase Sarana Prasarana terminal yang memadai	20%	20%		26.67%		36.67%		53.33%		76.67%		100%		100%		IKK Urusan Perhubungan		
									Persentase Sarana Prasarana Perparkiran yang memadai	33.33%	44.44%		55.56%		66.67%		77.78%		88.89%		100%		100%				
									Persentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek	15.8%	36.8%		66.7%		100%		100%		100%		100%		100%		PMDN 86 Tahun 2017		
									Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)	0.28	0.29		0.32		0.35		0.39		0.42		0.47		0.47		IKK Urusan Perhubungan		
		2	15	02	2	01	01	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Kajian dan Peraturan yang disusun	-	-	-	-	-	1 Perbup	20,000,000	2 Laporan	22,000,000	2 Laporan	22,000,000	2 Laporan	22,000,000	1 Kajian dan 1 Perbup	86,000,000	Bidang Prasarana dan Keselamatan	Dinas Perhubungan	
		2	15	02	2	01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Kajian Rencana Induk jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan	-	Seksi Pengembangan	Dinas Perhubungan	
		2	15	02	2	01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan Ltlaj Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah dan Kegiatan Sosialisasi	-	-	-	-	-	1 Perbup	10,000,000	1 kegiatan sosialisasi	12,000,000	1 kegiatan sosialisasi	12,000,000	1 kegiatan sosialisasi	12,000,000	1 Perbup dan 3 kali sosialisasi	46,000,000	Seksi Pengembangan	Dinas Perhubungan	
		2	15	02	2	01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan Renduk	-	-	-	-	-	1 laporan	10,000,000	4 laporan	40,000,000	Seksi Pengembangan	Dinas Perhubungan							
		2	15	02	2	02	01	Kegiatan Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan kabupaten/kota	Persentase perengkapan jalan yang terpasang	19.48%	23.42%	5,502,843,500	39.48%	5,343,775,100	57.95%	5,165,000,000	85.97%	5,165,000,000	91.18%	5,165,000,000	100%	5,165,000,000	100%	31,506,618,600	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Kab. Balangan	
		2	15	02	2	02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana Jalan Yang terpasang	-	-	-	-	-	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	100%	200,000,000	Seksi Lalu Lintas	Kab. Balangan	
		2	15	02	2	02	02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perengkapan Jalan Yang terpasang	22.91%	23.42%	1,057,664,000	39.48%	1,033,000,000	57.95%	600,000,000	85.97%	600,000,000	91.18%	600,000,000	100%	600,000,000	100%	4,490,664,000	Seksi Lalu Lintas	Kab. Balangan	
		2	15	02	2	02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Persentase Prasarana Jalan Yang terpelihara	100%	-	-	-	-	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	60,000,000	Seksi Lalu Lintas	Kab. Balangan	
		2	15	02	2	02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Persentase Perengkapan Jalan Yang terpelihara	100%	100%	4,445,179,500	100%	4,310,775,100	100%	4,500,000,000	100%	4,500,000,000	100%	4,500,000,000	100%	4,500,000,000	100%	26,755,954,600	Seksi Lalu Lintas	Kab. Balangan	
		2	15	02	2	03	01	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	PAD dari retribusi pelayanan terminal	6,000,000	6,000,000	81,840,000	6,000,000	94,690,000	7,000,000	730,000,000	7,000,000	735,000,000	7,500,000	275,000,000	7,500,000	300,000,000	41,000,000	2,216,530,000	Bidang Prasarana dan Keselamatan	Kab. Balangan	
		2	15	02	2	03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang terbangun	-	-	-	-	-	1 Paket	500,000,000	1 Paket	500,000,000	-	-	-	-	2 Paket	1,000,000,000	Seksi Prasarana	Kab. Balangan	
		2	15	02	2	03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana Prasarana Terminal Yang dibangun	-	-	-	-	-	1 Paket	75,000,000	1 Paket	80,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	125,000,000	5 Paket	380,000,000	Seksi Prasarana	Kab. Balangan	

		2	15	02	2	03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal yang dipelihara	-	-	-	-	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	5 Paket	200,000,000	Seksi Prasarana	Kab. Balangan		
		2	15	02	2	03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Pengelola Terminal Tipe C	-	-	81,840,000	1 Orang	94,690,000	3 Orang	105,000,000	3 Orang	105,000,000	3 Orang	125,000,000	3 Orang	125,000,000	15 Orang	636,530,000	Seksi Prasarana	Kab. Balangan	
		2	15	02	2	04	04	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Pelayanan Perpajakan	37.04%	37.04%	188,590,000	49.63%	145,890,000	62.22%	345,000,000	74.81%	375,000,000	87.41%	375,000,000	100%	380,000,000	100%	1,809,480,000	Bidang Prasarana dan Keselamatan	Kab. Balangan	
		2	15	02	2	04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin Penyelenggaraan Parkir Yang Dikeluarkan	10 izin	10 izin	188,590,000	10 izin	145,890,000	11 izin	325,000,000	12 izin	350,000,000	13 izin	350,000,000	14 izin	350,000,000	14 izin	1,709,480,000	Seksi Prasarana	Kab. Balangan	
									Jumlah Fasilitas Parkir yang terbangun	3 Buah	1 Buah	-	0 Buah	1 Buah	-	1 Buah	-	1 Buah	-	1 Buah	-	1 Buah	9 Buah	-	-	-	
		2	15	02	2	04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Parkir yang terbangun	-	-	-	-	-	1 laporan	20,000,000	1 laporan	25,000,000	1 laporan	25,000,000	1 laporan	30,000,000	5 laporan	100,000,000	Seksi Prasarana	Kab. Balangan	
		2	15	02	2	05	05	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	78%	78%	565,741,000	82%	559,549,500	86%	474,333,000	91%	555,275,000	95%	496,513,000	100%	1,873,063,000	100%	4,524,474,500	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	
		2	15	02	2	05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan bermotor	9 unit	1 unit	270,350,000,00	1 unit (sideslip tester)	253,350,000	1 unit (smoke tester)	150,000,000	1 unit (Axle play)	220,000,000	SIM PKB Eksternal	150,000,000	1 unit (Brake Tester)	1,500,000,000	13 unit Sarana Prasarana	2,543,700,000	Seksi Pengujian Sarana	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	
		2	15	02	2	05	02	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	0 orang	-	-	2 orang	20,000,000	2 orang	20,000,000	1 orang	10,000,000	2 orang	20,000,000	3 orang	30,000,000	10 orang	100,000,000	Seksi Pengujian Sarana	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	
		2	15	02	2	05	03	Registri Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang laik jalan	1.423 kendaraan	1.423 kendaraan	148,741,000	1.494 kendaraan	135,299,500	1.568 kendaraan	118,833,000	1.646 kendaraan	124,775,000	1.728 kendaraan	131,013,000	1.814 kendaraan	137,563,000	1.814 kendaraan	796,224,500	Seksi Pengujian Sarana	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	
		2	15	02	2	05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji	900 set	900 set	22,500,000	1,500 set	37,500,000	2,000 set	50,000,000	2,000 set	50,000,000	2,000 set	50,000,000	2,000 set	50,000,000	10,000 set	260,000,000	Seksi Pengujian Sarana	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	
		2	15	02	2	05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Brosur/ leaflet	-	-	-	-	-	1,000 lembar	6,500,000	1,000 lembar	6,500,000	1,000 lembar	6,500,000	1,000 lembar	6,500,000	5,000 lembar	26,000,000	Seksi Pengujian Sarana	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	
		2	15	02	2	05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis	-	-	-	-	-	1 laporan	1,000,000	1 laporan	1,000,000	1 laporan	1,000,000	1 laporan	1,000,000	5 laporan	4,000,000	Seksi Pengujian Sarana	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	
		2	15	02	2	05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	124,150,000	10 Unit	113,400,000	10 Unit	115,000,000	10 Unit	120,000,000	10 Unit	125,000,000	10 Unit	125,000,000	10 Unit	722,550,000	Seksi Pengujian Sarana	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	
		2	15	02	2	05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	3 kali	10,000,000	3 kali	10,000,000	3 kali	10,000,000	3 kali	10,000,000	15 kali	40,000,000	Seksi Pengujian Sarana	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	
		2	15	02	2	05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah peraturan daerah	-	-	-	-	-	-	-	1 Perbub	10,000,000	-	-	1 Perbub	10,000,000	3 perbub	20,000,000	Seksi Pengujian Sarana	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	
		2	15	02	2	05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Monev	-	-	-	-	-	1 laporan	3,000,000	1 laporan	3,000,000	1 laporan	3,000,000	1 laporan	3,000,000	5 laporan	12,000,000	Seksi Pengujian Sarana	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	
		2	15	02	2	06	06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diselenggarakan	-	1 Buah	718,420,000	2 Buah	683,945,000	3 Buah	764,780,000	3 Buah	787,069,000	3 Buah	796,875,000	3 Buah	802,162,500	15 Buah	4,553,251,500	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Kab. Balangan	
		2	15	02	2	06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diselenggarakan	-	-	-	-	-	3 Buah	30,000,000	3 Buah	30,000,000	3 Buah	30,000,000	3 Buah	30,000,000	15 Buah	120,000,000	Seksi Lalu Lintas	Kab. Balangan	
		2	15	02	2	06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang	-	-	-	-	-	12 Buah	24,000,000	12 Buah	24,000,000	12 Buah	24,000,000	12 Buah	24,000,000	60 Buah	96,000,000	Seksi Lalu Lintas	Kab. Balangan	
		2	15	02	2	06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan uji coba dan sosialisasi manajemen rekayasa lalu lintas	-	-	-	-	-	3 Laporan	15,000,000	3 Laporan	15,000,000	3 Laporan	15,000,000	3 Laporan	15,000,000	15 Laporan	60,000,000	Seksi Lalu Lintas	Kab. Balangan	
		2	15	02	2	06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan & Pengendalian Keselamatan Lalu lintas yang dilaksanakan	200 Kegiatan	200 Kegiatan	709,470,000	200 Kegiatan	640,345,000	200 Kegiatan	650,000,000	200 Kegiatan	670,000,000	200 Kegiatan	675,000,000	200 Kegiatan	675,000,000	1,200 Kegiatan	4,019,815,000	Seksi Lalu Lintas	Kab. Balangan	
		2	15	02	2	06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan	-	1 Laporan	8,950,000	4 Laporan	43,600,000	4 Laporan	45,780,000	4 Laporan	48,069,000	4 Laporan	52,875,000	4 Laporan	58,162,500	21 Laporan	257,436,500	Seksi Lalu Lintas	Kab. Balangan	
		2	15	02	2	07	07	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	1 Buah	7,160,000	-	-	2 Buah	40,000,000	2 Buah	40,000,000	2 Buah	40,000,000	2 Buah	40,000,000	2 Buah	167,160,000	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Kab. Balangan	

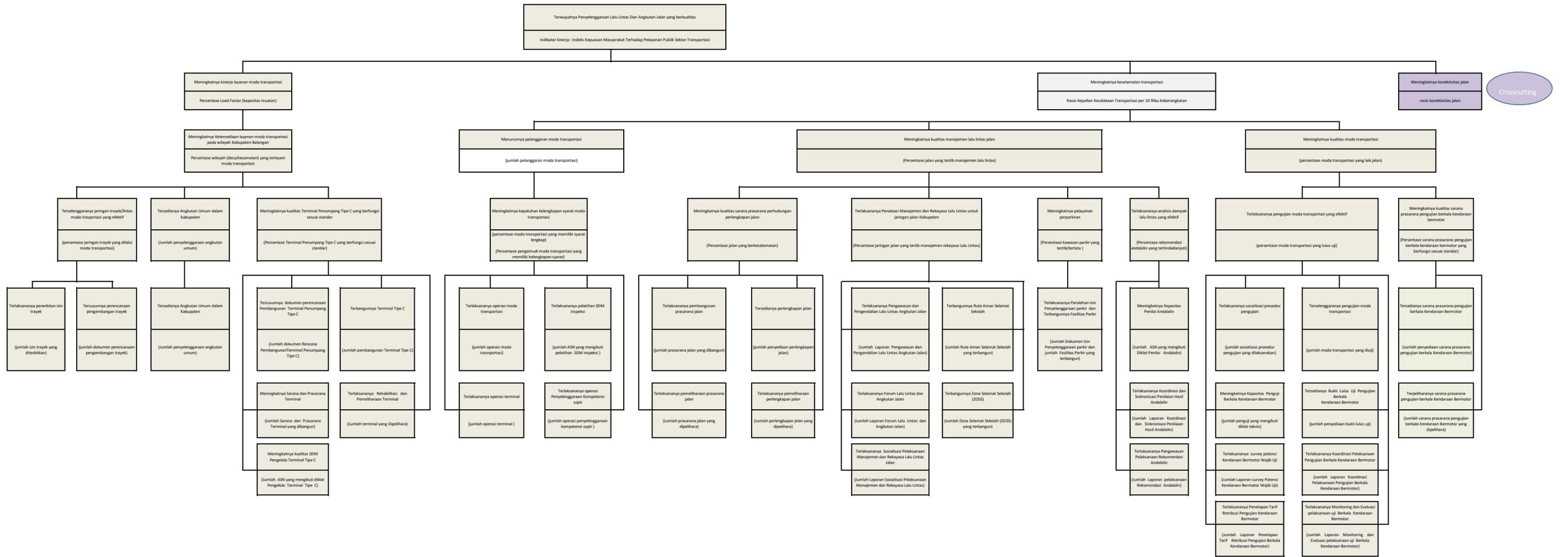
		2	15	02	2	07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah penetapan rekomendasi andalalin	-	1 Buah	7,160,000	-	-	-	-	-	-	1 Buah	7,160,000	Seksi Lalu Lintas	Kab. Balangan					
		2	15	02	2	07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Penilai Andalalin	-	-	-	-	2 Orang	30,000,000	10 Kali	120,000,000	Seksi Lalu Lintas	Kab. Balangan								
		2	15	02	2	07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 Laporan	-	Seksi Lalu Lintas	Kab. Balangan			
		2	15	02	2	07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Pengawasan yang dilaksanakan	-	-	-	-	2 Laporan	10,000,000	10 Laporan	40,000,000	Seksi Lalu Lintas	Kab. Balangan								
		2	15	02	2	08		Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	0	0	0	30	6,300,000	62	305,000,000	62	340,000,000	62	375,000,000	62	430,000,000	278	1,456,300,000	Bidang Prasarana dan Keselamatan	Kab. Balangan	
		2	15	02	2	08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor & Inspektur LLAJ yang memenuhi kapasitas	0%	-	-	-	2	35,000,000	2	40,000,000	2	45,000,000	2	50,000,000	10	170,000,000	Seksi Keselamatan	Kab. Balangan		
		2	15	02	2	08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan keadaan & kinerja obyek yang diinspeksi, Audit & Pemantauan	0%	-	-	-	12	40,000,000	12	50,000,000	12	60,000,000	12	80,000,000	60	230,000,000	Seksi Keselamatan	Kab. Balangan		
		2	15	02	2	08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah laporan keadaan & kinerja obyek yang diinspeksi, Audit & Pemantauan	0%	-	-	-	12	40,000,000	12	50,000,000	12	60,000,000	12	80,000,000	60	230,000,000	Seksi Keselamatan	Kab. Balangan		
		2	15	02	2	08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Inspeksi, Audit & Pemantauan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten / Kota yang memenuhi Persyaratan	0%	-	-	1	6,300,000	24	125,000,000	24	130,000,000	24	135,000,000	24	140,000,000	120	536,300,000	Seksi Keselamatan	Kab. Balangan	
		2	15	02	2	08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan hasil Inspeksi, Audit & Pemantauan Sistem manajemen keselamatan perusahaan	0%	-	-	-	12	65,000,000	12	70,000,000	12	75,000,000	12	80,000,000	60	290,000,000	Seksi Keselamatan	Kab. Balangan		
		2	15	02	2	09		Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum (unit)	1 Unit	1 Unit	40,965,000	1 Unit	54,625,000	2 Unit	457,100,000	3 Unit	537,200,000	4 Unit	618,500,000	5 Unit	699,000,000	5 Unit	2,407,390,000	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Kab. Balangan	
		2	15	02	2	09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum (unit)	1 Unit	1 Unit	40,965,000	1 Unit	54,625,000	2 Unit	457,100,000	3 Unit	537,200,000	4 Unit	618,500,000	5 Unit	699,000,000	5 Unit	2,407,390,000	Seksi Angkutan	Kab. Balangan	
								JUMLAH				11,188,542,318		10,949,429,370		14,519,954,000		15,506,728,000		15,638,577,000		17,480,225,500		85,283,456,188			

**Tabel T-C.27. (Penyesuaian RENSTRA)
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan
Kabupaten Balangan**

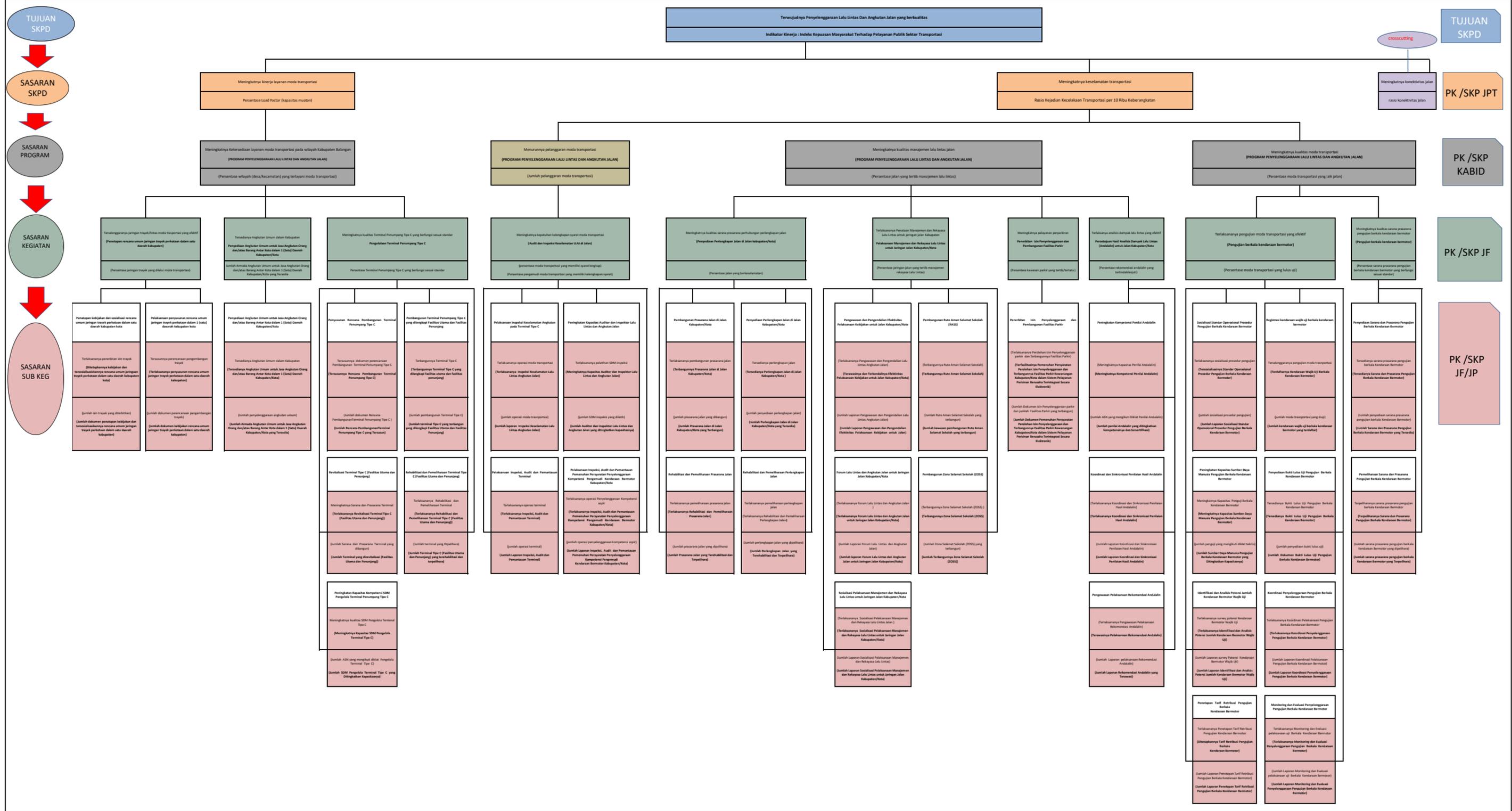
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										(19)	(20)	(21)				
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025					Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp	Target	Rp
Terwujudnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66,98	68,10	4,090,482,818	73,74	4,072,154,770	78,00	7,392,850,000	78,10	13,013,003,000	78,25	9,527,545,000	78,50	9,792,600,000	78,50	43,798,152,770	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100,980,000	100%	101,380,000	100%	129,500,000	100%	137,500,000	100%	194,900,000	100%	213,600,000	100%	877,860,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	87,180,000	2 Dok	87,180,000	2 Dok	115,000,000	2 Dok	120,000,000	2 Dok	176,000,000	2 Dok	193,600,000	13 Dok	778,960,000	Sekretariat	Sekretariat
		2	15	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	2 Dok	2,700,000	2 Dok	4,000,000	2 Dok	4,000,000	2 Dok	4,500,000	2 Dok	4,950,000	2 Dok	5,500,000	12 Dok	25,650,000	Sekretariat	Sekretariat
		2	15	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	2 Dok	4,000,000	2 Dok	4,000,000	2 Dok	4,000,000	2 Dok	4,500,000	2 Dok	4,950,000	2 Dok	5,500,000	12 Dok	26,950,000	Sekretariat	Sekretariat
		2	15	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	3,600,000	12 Laporan	2,700,000	12 Laporan	3,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	72 Laporan	24,300,000	Sekretariat	Sekretariat
		2	15	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	3,500,000	4 laporan	3,500,000	4 laporan	3,500,000	4 laporan	3,500,000	4 laporan	4,000,000	4 laporan	4,000,000	24 laporan	22,000,000	Sekretariat	Sekretariat
		2	15	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	3,082,254,800	100%	3,124,365,370	100%	4,811,000,000	100%	4,949,200,000	100%	5,163,720,000	100%	5,180,700,000	100%	26,311,240,170	Sekretariat	Sekretariat
		2	15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	35 Orang	2,992,662,800	35 Orang	3,067,479,370	35 Orang	4,709,000,000	35 Orang	4,800,000,000	38 Orang	5,000,000,000	40 Orang	5,000,000,000	40 Orang	25,569,142,170	Sekretariat	Sekretariat
		2	15	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	89,592,000	12 Dokumen	56,886,000	12 Dokumen	102,000,000	12 Dokumen	145,200,000	12 Dokumen	159,720,000	12 Dokumen	175,700,000	72 Dokumen	729,098,000	Sekretariat	Sekretariat
		2	15	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	-	1 Laporan	4,000,000	1 Laporan	4,000,000	1 Laporan	5,000,000	3 Laporan	13,000,000	Sekretariat	Sekretariat		
		2	15	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	102,529,000	100%	138,846,000	100%	236,550,000	100%	378,500,000	100%	438,500,000	100%	444,000,000	100%	1,738,925,000	Sekretariat	Sekretariat
		2	15	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	1 Paket	66,550,000	1 Paket	110,000,000	1 Paket	120,000,000	1 Paket	125,000,000	4 Paket	421,550,000	Sekretariat	Sekretariat
		2	15	01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	-	-	1 Dokumen	3,500,000	1 Dokumen	3,500,000	1 Dokumen	4,000,000	3 Dokumen	11,000,000	Sekretariat	Sekretariat		
		2	15	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	4 Orang	20,326,000	-	-	-	2 Orang	30,000,000	2 Orang	30,000,000	2 Orang	30,000,000	10 Orang	110,326,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	5 Orang	35,000,000	5 Orang	35,000,000	5 Orang	35,000,000	5 Orang	35,000,000	15 Orang	105,000,000	Sekretariat	Sekretariat
		2	15	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	15 Orang	82,203,000	23 Orang	138,846,000	50 Orang	170,000,000	50 Orang	200,000,000	50 Orang	250,000,000	50 Orang	250,000,000	238 Orang	1,091,049,000	Sekretariat	Sekretariat
		2	15	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	317,140,800	100%	313,654,500	100%	905,300,000	100%	969,800,000	100%	1,054,800,000	100%	1,084,800,000	100%	4,645,495,300	Sekretariat	Sekretariat
		2	15	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	1 Paket	4,645,100	2 Paket	20,000,000	2 Paket	20,000,000	2 Paket	25,000,000	2 Paket	25,000,000	9 Paket	94,645,100	Sekretariat	Sekretariat
		2	15	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7,400,000	1 Paket	34,000,000	3 Paket	35,000,000	3 Paket	50,000,000	4 Paket	100,000,000	4 Paket	100,000,000	16 Paket	326,400,000	Sekretariat	Sekretariat
		2	15	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	3 Paket	90,000,000	Sekretariat	Sekretariat	

		2	15	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	24,071,800	12 Paket	20,742,400	12 Paket	32,500,000	12 Paket	40,000,000	12 Paket	45,000,000	12 Paket	50,000,000	72 Paket	212,314,200	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	9,600,000	12 Dokumen	4,800,000	12 Dokumen	4,800,000	12 Dokumen	4,800,000	12 Dokumen	4,800,000	12 Dokumen	4,800,000	72 Dokumen	33,600,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan	174 Laporan	276,069,000	250 Laporan	249,467,000	443 Laporan	813,000,000	450 Laporan	825,000,000	470 Laporan	850,000,000	475 Laporan	875,000,000	2262 Laporan	3,888,536,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	100%	115,000,000	100%	5,115,503,000	100%	1,075,000,000	100%	1,175,000,000	100%	7,480,503,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 unit	120,000,000	1 unit	350,000,000	1 unit	400,000,000	3 Unit	870,000,000	Sekretariat	Sekretariat			
		2	15	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	2 Unit	55,000,000	16 Unit	4,570,503,000	5 Unit	250,000,000.0	5 Unit	250,000,000.0	28 Unit	5,125,503,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	2 Unit	30,000,000	2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000	8 Unit	180,000,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 unit	25,000,000	1 unit	25,000,000	1 unit	25,000,000	1 unit	25,000,000	3 unit	75,000,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 unit	100,000,000	1 unit	100,000,000	1 unit	100,000,000	1 unit	100,000,000	3 unit	300,000,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 unit	200,000,000	1 unit	250,000,000	1 unit	300,000,000	1 unit	300,000,000	3 unit	750,000,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	3 Unit	15,000,000	3 Unit	25,000,000	3 Unit	25,000,000	3 Unit	25,000,000	12 Unit	90,000,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	3 Unit	15,000,000	3 Unit	25,000,000	3 Unit	25,000,000	3 Unit	25,000,000	12 Unit	90,000,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	174,451,050	100%	150,991,900	100%	333,000,000	100%	510,000,000	100%	575,000,000	100%	625,000,000	100%	2,368,442,950	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5,550,000	12 Laporan	5,550,000	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	150,000,000	12 Laporan	200,000,000	12 Laporan	200,000,000	72 Laporan	571,100,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	75,624,000	12 Laporan	73,400,000	12 Laporan	160,000,000	12 Laporan	160,000,000	12 Laporan	175,000,000	12 Laporan	175,000,000	72 Laporan	819,024,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	93,277,050	12 Laporan	72,041,900	12 Laporan	163,000,000	12 Laporan	200,000,000	12 Laporan	200,000,000	12 Laporan	250,000,000	72 Laporan	978,318,950	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	313,127,168	100%	242,917,000	100%	862,500,000	100%	952,500,000	100%	1,025,625,000	100%	1,069,500,000	100%	4,466,169,168	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	-	-	-	2 Unit	262,500,000	2 Unit	287,500,000	2 Unit	325,625,000	2 Unit	369,500,000	2 Unit	1,245,125,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	265,607,168	6 Unit	195,397,000	6 Unit	340,000,000	6 Unit	340,000,000	6 Unit	350,000,000	6 Unit	350,000,000	6 Unit	1,841,004,168	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	5 Unit	25,000,000	5 Unit	25,000,000	5 Unit	25,000,000	5 Unit	25,000,000	15 Unit	75,000,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	47,520,000	2 Unit	47,520,000	2 Unit	260,000,000	2 Unit	275,000,000	2 Unit	300,000,000	2 Unit	300,000,000	2 Unit	1,230,040,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	2 Unit	25,000,000	2 Unit	25,000,000	2 Unit	25,000,000	2 Unit	25,000,000	6 Unit	75,000,000	Sekretariat	Sekretariat	
Terwujudnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berkualitas	Meningkatnya kinerja layanan moda transportasi	2	15	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase wilayah (desa/kecamatan) yang terlayani moda transportasi	36.8%	36.8%	7,283,399,500	36.8%	7,207,474,600	66.7%	35,676,766,100	100%	40,486,040,000	100%	38,260,924,000	100%	43,049,666,400	100%	171,964,270,600	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Kab. Balangan	IKK Urusan Perhubungan
	Meningkatnya keselamatan transportasi								Jumlah pelanggaran moda transportasi	-	15	14	13	12	11	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
									Persentase jalan yang tertib manajemen lalu lintas	0%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
									Persentase moda transportasi yang laik jalan	78%	78%	82%	86%	91%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		2	15	02	2	01	01	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota yang ditetapkan	-	-	-	-	-	1 Dokumen	137,000,000	1 Dokumen	137,000,000	1 Dokumen	137,000,000	1 Dokumen	137,000,000	1 Dokumen	411,000,000	Bidang Prasarana dan Keselamatan	Dinas Perhubungan	
		2	15	02	2	01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	300,000,000	Seksi Pengembangan	Dinas Perhubungan	
		2	15	02	2	01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	1 Dokumen	12,000,000	1 Dokumen	12,000,000	1 Dokumen	12,000,000	1 Dokumen	12,000,000	1 Dokumen	36,000,000	Seksi Pengembangan	Dinas Perhubungan	

		2	15	02	2	11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	3 Dokumen	300,000,000	Seksi Angkutan	Kab. Balangan	
		2	15	02	2	11	03	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	3 Dokumen	75,000,000	Seksi Angkutan	Kab. Balangan	
								JUMLAH									53,499,043,000		47,788,469,000		52,842,266,400		219,852,906,188			



Crosscutting



- TUJUAN SKPD
- SASARAN SKPD
- SASARAN PROGRAM
- SASARAN KEGIATAN
- SASARAN SUB KEG

- TUJUAN SKPD
- PK/SKP JPT
- PK/SKP KABID
- PK/SKP JF
- PK/SKP JF/IP

Terwujudnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang Berkualitas

Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi

Meningkatnya Kinerja layanan moda transportasi
Persentase Load Factor (Kapasitas muatan)

Meningkatnya keselamatan transportasi
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan

Meningkatnya konektivitas jalan
rasio konektivitas jalan

Meningkatnya Keterersediaan layanan moda transportasi pada wilayah Kabupaten Balingan
(PROGRAM PENYELANGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN)
(Persentase wilayah (Desa/Recamatan) yang terlayani moda transportasi)

Menurunnya pelanggaran moda transportasi
(PROGRAM PENYELANGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN)
(Jumlah pelanggaran moda transportasi)

Meningkatnya kualitas manajemen lalu lintas jalan
(PROGRAM PENYELANGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN)
(Persentase jalan yang terlih manajemen lalu lintas)

Meningkatnya kualitas moda transportasi
(PROGRAM PENYELANGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN)
(Persentase moda transportasi yang laik jalan)

Terwujudnya jaringan trayek/Arus moda transportasi yang efektif
(Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam satu daerah kabupaten)
(Persentase jaringan trayek yang efektif moda transportasi)

Terwujudnya Angkutan Umum dalam Kabupaten
Pelayanan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
(Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terwujud)

Meningkatnya kualitas Terminal Pemumpang Tipe C yang berfungsi sesuai standar
Pengalihan Terminal Pemumpang Tipe C
(Persentase Terminal Pemumpang Tipe C yang berfungsi sesuai standar)

Meningkatnya kepatuhan ketertarikan syarat moda transportasi
(Audit dan Inspeksi Keselamatan LAU di Jalan)
(Persentase moda transportasi yang memiliki surat lengkap)
(Persentase pengemudi moda transportasi yang memiliki ketertarikan surat)

Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan perlintasan jalan
(Peningkatan Perhubungan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota)
(Persentase jalan yang berkelembagaan)

Terlaksananya Pemetaan Manajemen dan Kebijakan Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten
Pelibatan Masyarakat dan Kebijakan Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
(Persentase jaringan jalan yang terlih manajemen kebijakan lalu lintas)

Meningkatnya pelayanan perantara
Perbaikan dan Pengembangan Fasilitas Parkir
(Persentase kawasan parkir yang terlih/terbuka)

Terlaksananya analisis dampak lalu lintas yang efektif
Penetapan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalasan) untuk Jalan Kabupaten/Kota
(Persentase rekomendasi andalasan yang terlih/terpenuhi)

Terlaksananya pengujian moda transportasi yang efektif
(Pengujian berkala kendaraan bermotor)
(Persentase moda transportasi yang laik uji)

Meningkatnya kualitas sarana prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor
(Pengujian berkala kendaraan bermotor)
(Persentase sarana prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terlih/terpenuhi sesuai standar)

Pendataan kelengkapan dan validasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam satu daerah kabupaten/kota
Terlaksananya penertiban sin trayek
Ditindaklanjutinya rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam satu daerah kabupaten/kota
(Jumlah sin trayek yang ditertibkan)
(Jumlah dokumen penertiban kelengkapan dan tindaklanjutinya rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam satu daerah kabupaten/kota)

Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
Terlaksananya penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam satu daerah kabupaten/kota
(Terlaksananya penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam satu daerah kabupaten/kota)
(Jumlah dokumen penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam satu daerah kabupaten/kota)

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Terwujudnya Angkutan Umum dalam Kabupaten
(Terwujudnya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota)
(Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terwujud)

Perencanaan, Rencana, Pembangunan Terminal Pemumpang Tipe C
Terwujudnya dukungan perencanaan pembangunan Terminal Pemumpang Tipe C
(Terwujudnya Rencana, Pembangunan Terminal Pemumpang Tipe C)
(Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Terminal Pemumpang Tipe C)
(Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Pemumpang Tipe C yang Terwujud)

Pengalihan Terminal Pemumpang Tipe C yang ditargetkan Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
Terwujudnya Terminal Tipe C
(Terwujudnya Terminal Tipe C yang ditargetkan yang ditargetkan Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang)
(Jumlah Terminal Tipe C yang ditargetkan yang ditargetkan Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang)

Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C
Terlaksananya operasi moda transportasi
(Terlaksananya Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan)
(Jumlah laporan inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan)

Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Terlaksananya pelatihan SDM inspektur
(Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
(Jumlah SDM inspektur yang diteliti)

Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Terlaksananya pembangunan prasarana jalan
(Terwujudnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota)
(Jumlah prasarana jalan yang dibangun)

Penyediaan Perhubungan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Terwujudnya Perhubungan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
(Terwujudnya Perhubungan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota)
(Jumlah Perhubungan Jalan yang Terwujud)

Pengawasan dan Pengembangan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
(Terlaksananya Pengawasan dan Pengembangan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota)
(Terwujudnya Pengawasan dan Pengembangan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota)

Rehabilitasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
Meningkatnya sarana dan prasarana Terminal Tipe C
(Terlaksananya Rehabilitasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang))
(Jumlah Terminal yang direhabilitasi (Fasilitas Utama dan Penunjang))

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
(Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang))
(Jumlah Terminal yang direhabilitasi dan pemeliharaan)

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan
(Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan)
(Jumlah prasarana jalan yang direhabilitasi)

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perhubungan Jalan
Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan perhubungan jalan
(Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perhubungan Jalan)
(Jumlah perhubungan jalan yang direhabilitasi)

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan
(Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan)
(Jumlah prasarana jalan yang direhabilitasi)

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan
(Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan)
(Jumlah prasarana jalan yang direhabilitasi)

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan
(Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan)
(Jumlah prasarana jalan yang direhabilitasi)

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan
(Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan)
(Jumlah prasarana jalan yang direhabilitasi)

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan
(Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan)
(Jumlah prasarana jalan yang direhabilitasi)

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan
(Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan)
(Jumlah prasarana jalan yang direhabilitasi)

Peringatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Pemumpang Tipe C
Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
(Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C)
(Jumlah SDM yang mengikuti dilatih Pengelola Terminal Tipe C)

Peringatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Pemumpang Tipe C
Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
(Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C)
(Jumlah SDM yang mengikuti dilatih Pengelola Terminal Tipe C)

Peringatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Pemumpang Tipe C
Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
(Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C)
(Jumlah SDM yang mengikuti dilatih Pengelola Terminal Tipe C)

Peringatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Pemumpang Tipe C
Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
(Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C)
(Jumlah SDM yang mengikuti dilatih Pengelola Terminal Tipe C)

Peringatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Pemumpang Tipe C
Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
(Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C)
(Jumlah SDM yang mengikuti dilatih Pengelola Terminal Tipe C)

Peringatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Pemumpang Tipe C
Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
(Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C)
(Jumlah SDM yang mengikuti dilatih Pengelola Terminal Tipe C)

Peringatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Pemumpang Tipe C
Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
(Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C)
(Jumlah SDM yang mengikuti dilatih Pengelola Terminal Tipe C)

Peringatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Pemumpang Tipe C
Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
(Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C)
(Jumlah SDM yang mengikuti dilatih Pengelola Terminal Tipe C)

Peringatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Pemumpang Tipe C
Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
(Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C)
(Jumlah SDM yang mengikuti dilatih Pengelola Terminal Tipe C)

Peringatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Pemumpang Tipe C
Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
(Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C)
(Jumlah SDM yang mengikuti dilatih Pengelola Terminal Tipe C)

Peringatan Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Terlaksananya Pengujian Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
(Ditindaklanjutinya Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)
(Jumlah Laporan Pengujian Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)

Peringatan Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Terlaksananya Pengujian Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
(Ditindaklanjutinya Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)
(Jumlah Laporan Pengujian Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)

Peringatan Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Terlaksananya Pengujian Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
(Ditindaklanjutinya Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)
(Jumlah Laporan Pengujian Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)

Peringatan Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Terlaksananya Pengujian Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
(Ditindaklanjutinya Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)
(Jumlah Laporan Pengujian Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)

Peringatan Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Terlaksananya Pengujian Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
(Ditindaklanjutinya Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)
(Jumlah Laporan Pengujian Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)

Peringatan Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Terlaksananya Pengujian Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
(Ditindaklanjutinya Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)
(Jumlah Laporan Pengujian Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)

Peringatan Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Terlaksananya Pengujian Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
(Ditindaklanjutinya Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)
(Jumlah Laporan Pengujian Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)

Peringatan Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Terlaksananya Pengujian Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
(Ditindaklanjutinya Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)
(Jumlah Laporan Pengujian Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)

Peringatan Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Terlaksananya Pengujian Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
(Ditindaklanjutinya Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)
(Jumlah Laporan Pengujian Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)

Peringatan Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Terlaksananya Pengujian Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
(Ditindaklanjutinya Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)
(Jumlah Laporan Pengujian Tarif Berbasis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)

TABEL KERJA
MAPPING PEMUTAKHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA
BERDASARKAN PEMUTAKHIRAN KEMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 DAN HASIL EVALUASI CASCADING KEMENPAN RB
TAHUN 2023

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

SEBELUMNYA				MEJADI				PEMUTAKHIRAN (TAHUN 2023)			
KEMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020				KEMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021				KEMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023			
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	Nilai		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	Nilai		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	%		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	%		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Perhubungan	Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Dinas Perhubungan	Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	%		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	%		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai ketentuan perundang-undangan	%		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	%		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	%		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Buah		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Buah		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Buah		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lembar		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Eksm/Bulan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kali Porsi		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Buah		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola	Surat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan

SEBELUMNYA				MEJADI				PEMUTAKHIRAN (TAHUN 2023)			
KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020				KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021				KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023			
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas Layak Fungsi	%		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	%		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Buah		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung kantor layak fungsi	%		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung layak fungsi	%		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	%		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	%		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase moda transportasi yang laik jalan	%
		Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan	%			Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan	%			Jumlah pelanggaran moda transportasi	Laporan
		Persentase Sarana Prasarana terminal yang memadai	%			Persentase Sarana Prasarana terminal yang memadai	%			Persentase jalan yang tertib manajemen lalu lintas	%
		Persentase Sarana Prasarana Perparkiran yang memadai	%			Persentase Sarana Prasarana Perparkiran yang memadai	%			Persentase wilayah (desa/kecamatan) yang terlayani moda transportasi	%
		Persentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek	%			Persentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek	%				
		Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)	Nilai			Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)	Nilai				
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Kajian dan Peraturan yang disusun	Dokumen		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Kajian dan Peraturan yang disusun	Dokumen		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota yang ditetapkan	Dokumen
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Kajian Rencana Induk jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Dokumen		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah dan Kegiatan Sosialisasi	Dokumen		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan Renduk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan		Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/kota	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	%		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/kota	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	%		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/kota	Persentase jalan yang berkeselamatan	%
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana Jalan Yang terpasang	%		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpasang	%		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Persentase Prasarana Jalan yang terpelihara	%		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpelihara	%		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	PAD dari retribusi pelayanan terminal	Rp		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	PAD dari retribusi pelayanan terminal	Rp		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang berfungsi sesuai standar	%
	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang terbangun	Paket		Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit		Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana Prasarana Terminal Yang dibangun	Paket		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Unit		Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal yang dipelihara	Paket		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terhabilitasi dan terpelihara	Unit
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Pengelola Terminal Tipe C	Orang		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang		Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	Orang
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Pelayanan Perparkiran	%		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Pelayanan Perparkiran	%		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase kawasan parkir yang tertib/tertata	%
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin Penyelenggaraan Parkir Yang Dikeluarkan	Izin		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	Laporan		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	%		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	%		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase moda transportasi yang lulus uji	%
										Persentase sarana prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang berfungsi sesuai standar	%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Unit		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit
	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	Orang		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang

SEBELUMNYA				MEJADI				PEMUTAKHIRAN (TAHUN 2023)			
KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020				KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021				KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023			
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang laik jalan	Kendaraan		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji	Set		Penyediaan Bukti Lulus Uji Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen		Penyediaan Bukti Lulus Uji Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen
	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Brosur/ leaflet	Lembar		Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan		Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan
	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis	Laporan		Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan		Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana prasarana penguji kendaraan bermotor yang dipelihara	Unit		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Penguji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Penguji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit
	Koordinasi Penyelenggaraan Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali		Koordinasi Penyelenggaraan Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan		Koordinasi Penyelenggaraan Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan
	Penetapan Tarif Retribusi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah peraturan daerah	Dokumen		Penetapan Tarif Retribusi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan		Penetapan Tarif Retribusi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Movev	Laporan		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/ Kota	Jumlah Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas yang diselenggarakan	Buah		Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/ Kota	Jumlah Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas yang diselenggarakan	Laporan		Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase jaringan jalan yang tertib manajemen rekamata lalu lintas	%
	Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas yang diselenggarakan	Buah		Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Laporan		Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Laporan
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas	Jumlah perengkapan jalan yang terpasang	Buah		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas	Unit		Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas	Jumlah Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Unit
	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan uji coba dan sosialisasi manajemen rekamata lalu lintas	Laporan		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Dokumen		Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Laporan
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pengawasan & Pengendalian Keselamatan Lalu lintas yang dilaksanakan	Kegiatan		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Laporan		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Laporan
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/ Kota	Laporan		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Laporan		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Laporan
									Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RAS)	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	Unit
									Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Unit
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Buah		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Laporan		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase rekomendasi andalalin yang tertindaklanjuti	%
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah penetapan rekomendasi andalalin	Buah		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen		Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	Dokumen
	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Penilai Andalalin	Orang		Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang		Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Orang
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi	Laporan		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Pengawasan yang diselenggarakan	Laporan		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Laporan
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Laporan		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Laporan		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	(persentase moda transportasi yang memiliki syarat lengkap)	%
	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor & Inspektor LLAJ yang memenuhi kapasitas	Orang		Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang		Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan keadaan & kinerja obyek yang diinspeksi, Audit & Pemantauan	Laporan		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan				Laporan
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah laporan keadaan & kinerja obyek yang diinspeksi, Audit & Pemantauan	Laporan		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil Inspeksi, Audit & Pemantauan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota yang memenuhi Persyaratan	Laporan		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Laporan		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Laporan
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan hasil Inspeksi, Audit & Pemantauan Sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	Laporan		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum	Unit		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Unit		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Unit
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum	Unit		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Unit		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Unit
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jaringan trayek yang dilalui moda transportasi	%
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen

SEBELUMNYA				MEJADI				PEMUTAKHIRAN (TAHUN 2023)			
KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020				KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021				KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023			
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen

MENGETAHUI :
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



Drs. MUSA, M.AP
NIP. 19680113 199703 1 007

DISUN OLEH :
KASUBBAG PERENCANAAN
DINAS PERHUBUNGAN



SRI WAHYUNINGSIH, SE, MM
NIP. 19820116 201001 2 019

BERITA ACARA
HASIL PENYESUAIAN RENSTRA DAN IKU TERHADAP
PENYUSUNAN POHON KINERJA DAN CASCADING SECARA LOGICAL FRAMEWORK
DAN
PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR
SESUAI KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BALANGAN
Nomor : 800/195/Dishub-Blg/TAHUN 2023

Pada hari ini Selasa, Tanggal Empat Bulan Juli Tahun 2023, kami Tim Reviu Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Nomor : 188.45 /881/SK/DISHUB-BLG/2023 Tanggal 03 Juli 2023, telah melaksanakan Reviu Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dengan rincian hasil sebagai berikut :

I. TUJUAN

a. Uraian Tujuan Sebelum Reviu

MISI	TUJUAN
Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Tujuan

Terwujudnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berkualitas

c. Uraian Tujuan Sebelum dan Setelah Reviu

TUJUAN (setelah reviu)
Terwujudnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berkualitas

II. SASARAN

a. Uraian Sasaran Sebelum Reviu

TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Sasaran

1. Meningkatnya kinerja layanan moda transportasi
2. Meningkatnya keselamatan transportasi

c. Uraian Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu

SASARAN (setelah reviu)
1. Meningkatnya kinerja layanan moda transportasi
2. Meningkatnya keselamatan transportasi

III. INDIKATOR KINERJA SASARAN

a. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Reviu

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Perhubungan Darat
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi

b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Indikator Kinerja

1. Persentase Load Factor (kapasitas muatan)
2. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan

c. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu

INDIKATOR KINERJA (sebelum reviu)	INDIKATOR KINERJA (setelah reviu)
Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Perhubungan Darat	Persentase Load Factor (kapasitas muatan)
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan

IV. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Uraian IKU Sebelum Reviu

SASARAN	IKU
1. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Perhubungan Darat
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi

b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang IKU

1. Persentase Load Factor (kapasitas muatan)
2. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan

c. Uraian IKU Sebelum dan Setelah Reviu

IKU (sebelum reviu)	IKU (setelah reviu)
Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Perhubungan Darat	Persentase Load Factor (kapasitas muatan)
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan

V. FORMULASI INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKS) dan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Uraian Formulasi IKS/IKU Sebelum Reviu

Indikator Kinerja Sasaran	Alasan (sebelum reviu)	Cara Pengukuran (sebelum reviu)	Keterangan / Kriteria (sebelum reviu)
Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Perhubungan Darat	Pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan darat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan dan pengembangan infrastruktur perdesaan dan perkotaan untuk pemerataan pembangunan	Jumlah sarana prasarana terminal yang terpasang/terbangun dibagi kebutuhan optimal sarana prasarana terminal X 100%	Sumber data diperoleh dari Laporan Kegiatan Pemenuhan Perlengkapan Jalan, Sarana Prasarana Terminal serta Fasilitas Parkir
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	IKM Bidang Transportasi Darat merupakan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Transportasi Darat	Sumber data diperoleh dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor t

b. Rekomendasi Tim Reviu/Narasumber tentang Formulasi IKS

1. Jumlah Penumpang yang terangkut dibagi Kapasitas Angkut Angkutan X 100%
2. Jumlah Kejadian Kecelakaan dibagi 10.000 keberangkatan

c. Uraian IKS/IKU Setelah Reviu

Indikator Kinerja Sasaran	Alasan (setelah reviu)	Cara Pengukuran (setelah reviu)	Keterangan / Kriteria (setelah reviu)
Persentase Load Factor (kapasitas muatan)	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan salah satu parameter yang digunakan adalah load factor. Load factor dapat menjadi petunjuk untuk mengetahui apakah jumlah armada yang sudah ada mencukupi, masih kurang, atau melebihi kebutuhan suatu lintasan angkutan umum serta dapat dijadikan indikator dalam mewakili efisiensi suatu rute	Jumlah Penumpang yang terangkut dibagi Kapasitas Angkut Angkutan X 100%	Sumber data diperoleh dari Laporan Kegiatan Pelayanan Angkutan
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribuan Keberangkatan	Untuk mengutamakan efektifitas dan efisiensi keselamatan transportasi	Jumlah Kejadian Kecelakaan dibagi 10.000 keberangkatan	Sumber data diperoleh dari Hasil koordinasi bersama SATLANTAS POLRES Balangan

VI. TARGET KINERJA

a. Rincian Target Indikator Kinerja(IKS/IKU) Sebelum Reviu

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Perhubungan Darat	%	29,28%	40,57%	53,76%	72,36%	85,58%	100%	100%

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	82,98	84,18	85,39	86,59	87,80	89,00	89,00

b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Target Kinerja Sasaran

Target Kinerja Sasaran agar disesuaikan dengan indikator kinerja sasaran yang telah direview yang sudah sinkron dengan visi, misi, tujuan dan sasaran

c. Rincian Target Indikator Kinerja (IKS/IKU) Setelah Reviu

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Persentase Load Factor (kapasitas muatan)	%	122,4%	137%	137%	108,1%	105,9%	100%	100%
2. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan	Rasio	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0027	0,0027

Berdasarkan hasil reviu tersebut di atas maka **Tabel Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 Hasil Reviu Tahun 2023**, adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berkualitas	Meningkatnya kinerja layanan moda transportasi	Persentase Load Factor (kapasitas muatan)	%	122,4%	137%	137%	108,1%	105,9%	100%	100%
		Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan	Rasio	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0027	0,0027

<p>Mengetahui :</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan</p>  <p>Drs. H. MUSA ABDULLAH, M.AP Pembina Utama Muda/IVc NIP. 19680113 199703 1 007</p>	<p>Paringin, Juli 2023</p> <p>Tim Reviu Renstra dan IKU Dinas Perhubungan Kab. Balangan :</p>		
	1. Ketua Tim	NURHILALIYAH, S.KM, MM	
	2. Anggota	ROSMA HILDA, ST	
	3. Anggota	RAHMADI, S.Sos	
	4. Anggota	SRI WAHYUNINGSIH, SE, MM	



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG
PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun

2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran

- Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
 25. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
 26. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Balangan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 5);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 – 2026

s

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam mencapai tujuan.
12. Indikator Makro adalah indikator umum yang merupakan indikator gabungan dan berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial.
13. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.
14. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
16. Program Prioritas adalah program yang menjadi fokus daerah dalam pencapaian visi misi RPJMD.

17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact).

Pasal 2

- (1) Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2021 - 2026.
- (2) Penyesuaian Renstra PD tahun 2018-2023 bertujuan untuk integrasi, sinkronisasi, sinergitas, dan penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan Daerah terhadap dokumen pembangunan nasional.
- (3) Penyesuaian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	: PENDAHULUAN
Bab II	: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Bab III	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Bab IV	: TUJUAN DAN SASARAN
Bab V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Bab VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab VIII	: PENUTUP

- (2) Penyesuaian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan penyusunan penyesuaian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perangkat Daerah membentuk tim penyusun penyesuaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan pejabat terkait di lingkungan Perangkat Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 25 Juli 2023

BUPATI BALANGAN,

ttd.

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 25 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

H. SUTIKNO, AP, M.AP

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 NOMOR 47